

RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELAMATAN DANAU PRIORITAS NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa danau merupakan bagian dari ekosistem, sumber daya air, sumber air yang memiliki nilai ekonomi, ekologis, sejarah, budaya, dan hubungan yang erat dengan kehidupan masyarakat di Indonesia;
 - b. bahwa kondisi beberapa danau di Indonesia saat ini telah mengalami tekanan dan degradasi berupa kerusakan daerah tangkapan air, sempadan danau, penurunan kualitas air, penurunan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, peningkatan erosi/sedimentasi, pendangkalan, dan punahnya jenis biota endemik, yang menjadi ancaman bagi kelestarian fungsi danau dan mengakibatkan kerugian bagi kehidupan masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka mengendalikan kerusakan, menjaga, memulihkan, dan mengembalikan kondisi dan fungsi danau, perlu dilakukan dilakukan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan secara terpadu melalui **Penyelamatan Danau Prioritas Nasional**;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4746);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor);

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELAMATAN DANAU PRIORITAS NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
2. Danau adalah wadah Air di permukaan bumi dan ekosistemnya yang terbentuk secara alami yang dibatasi sekelilingnya oleh Sempadan Danau.
3. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

4. Penyelamatan Danau Prioritas Nasional adalah upaya untuk mengendalikan kerusakan, menjaga, memulihkan, dan mengembalikan kondisi dan fungsi Badan Air Danau, Daerah Tangkapan Air, dan Sempadan Danau sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
5. Daerah Tangkapan Air Danau adalah suatu wilayah daratan yang menampung dan menyimpan Air dari curah hujan dan mengalirkannya ke Danau secara langsung atau melalui sungai yang bermuara ke Danau.
6. Sempadan Danau adalah luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan Danau yang berfungsi sebagai kawasan pelindung danau, fasilitas publik, masyarakat, dan kepentingan aspek lingkungan.
7. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan Air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
8. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
9. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
10. Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional adalah wadah sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden ini dalam rangka Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

11. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
12. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
13. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
14. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat/masyarakat adat, akademisi, filantropi, organisasi profesi/ilmiah, asosiasi/dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya yang terkait dengan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.
16. Dewan Sumber Daya Air Nasional adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan untuk melakukan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam rangka Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan 15 (lima belas) Danau Prioritas Nasional yaitu Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara, Danau Maninjau di Provinsi Sumatera Barat, Danau Singkarak di Provinsi Sumatera Barat,

Danau Kerinci di Provinsi Jambi, Danau Rawa Danau di Provinsi Banten, Danau Rawa Pening di Provinsi Jawa Tengah, Danau Sentarum di Provinsi Kalimantan Barat, Danau Kaskade Mahakam (Melintang, Semayang, dan Jempang) di Provinsi Kalimantan Timur, Danau Batur di Provinsi Bali, Danau Limboto di Provinsi Gorontalo, Danau Tondano di Provinsi Sulawesi Utara, Danau Poso di Provinsi Sulawesi Tengah, Danau Matano di Provinsi Sulawesi Selatan, Danau Tempe di Provinsi Sulawesi Selatan, dan Danau Sentani di Provinsi Papua.

- (2) Danau Prioritas Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan danau yang memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. mengalami tekanan dan degradasi berupa kerusakan Daerah Tangkapan Air Danau, kerusakan Sempadan Danau, kerusakan Badan Air Danau, peningkatan sedimentasi, penurunan kualitas air, dan penurunan keanekaragaman hayati yang mengakibatkan masalah ekologi, ekonomi, dan sosial budaya bagi masyarakat.
 - b. memiliki nilai strategis ekologi, ekonomi, atau sosial budaya; dan/atau
 - c. tercantum dalam salah satu dokumen perencanaan pembangunan, rencana induk, dan/atau bentuk dokumen teknis lainnya di sektor Air dan/atau Danau.

Pasal 4

Penyelamatan Danau Prioritas Nasional didasarkan pada arah kebijakan dan strategi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 5

- (1) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. mempertahankan Danau Prioritas Nasional dari ancaman penurunan kondisi dan fungsi;
 - b. mengendalikan kerusakan Danau Prioritas Nasional;

- c. memulihkan dan mengembalikan Danau Prioritas Nasional yang rusak; dan
- d. memanfaatkan Danau Prioritas Nasional dengan tetap memperhatikan kondisi dan fungsinya secara berkelanjutan.

(2) Strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. mengintegrasikan penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam penataan ruang;
- b. mengintegrasikan penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam kebijakan, rencana, dan program sektoral/wilayah;
- c. mengendalikan kerusakan Danau, Sempadan Danau, Daerah Tangkapan Air Danau, dan Daerah Aliran Sungai;
- d. mengoptimalkan pemanfaatan Danau Prioritas Nasional sesuai dengan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
- e. membangun komitmen, koordinasi, dan kemitraan Pemerintah dan Pemangku Kepentingan dalam Penyelamatan Danau Prioritas Nasional;
- f. meningkatkan koordinasi dan keterpaduan/integrasi penyelamatan Danau Prioritas antar-pemangku kepentingan;
- g. meningkatkan kapasitas Pemerintah dan Pemangku Kepentingan dalam Penyelamatan Danau Prioritas Nasional;
- h. menerapkan hasil riset, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk Penyelamatan Danau Prioritas Nasional;
- i. mengembangkan sistem monitoring, evaluasi, dan informasi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional;
- j. mendorong penegakan hukum dalam rangka Penyelamatan Danau Prioritas Nasional; dan
- k. mengembangkan mekanisme dan sumber pendanaan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

Pasal 6

- (1) Strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dijabarkan ke dalam program, kegiatan, dan sasaran Penyelamatan Danau Prioritas Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (2) Program, kegiatan, dan sasaran Penyelamatan Danau Prioritas Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk masing-masing Danau Prioritas Nasional.
- (3) Program, kegiatan dan sasaran Penyelamatan Danau Prioritas Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 7

- (1) Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan program, kegiatan, dan sasaran Penyelamatan Danau Prioritas Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pelaksanaan program, kegiatan, dan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan program dan kegiatan pembangunan di tingkat pusat dan daerah.

Pasal 8

- (1) Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tingkat Daerah melakukan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Hasil sinkronisasi dan harmonisasi sebagai capaian pelaksanaan program, kegiatan, dan sasaran Penyelamatan Danau Prioritas Nasional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 dilaporkan kepada Dewan Pengarah Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional melalui Ketua Tim Pelaksana paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 9

- (1) Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tingkat Pusat melakukan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Hasil sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi sebagai capaian pelaksanaan program, kegiatan, dan sasaran Penyelamatan Danau Prioritas Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaporkan kepada Dewan Pengarah Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional melalui Ketua Tim Pelaksana paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 11

Berdasarkan hasil sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2), Menteri selaku Ketua Dewan Pengarah Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional menyampaikan laporan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional kepada Presiden 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 12

- (1) Menteri/Kepala Lembaga terkait, gubernur, dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sosialisasi, advokasi, bimbingan teknis, pelatihan, promosi, penguatan koordinasi dan jejaring dalam rangka Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

Pasal 13

Dalam rangka Penyelamatan Danau Prioritas Nasional, dibentuk Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

Pasal 14

- (1) Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional bertugas melakukan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.
- (2) Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional terdiri atas:
 - a. Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tingkat Pusat; dan
 - b. Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tingkat Daerah.

Pasal 15

- (1) Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional di tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Dewan Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim Pakar.
- (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. memberikan arahan dalam pencapaian program, kegiatan, dan sasaran Penyelamatan Danau Prioritas Nasional;
 - b. memberikan arahan dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional;
 - c. memberikan arahan dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional; dan
 - d. menyampaikan laporan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional kepada Presiden.
- (3) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Ketua merangkap Anggota, yaitu Menteri.
 - b. Anggota, yaitu :
 1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 2. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 3. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
 4. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang;
 5. menteri yang tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
 6. menteri yang tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan;
 7. menteri yang tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
 8. menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa,

- percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
9. menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
 10. menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang energi dan sumber daya mineral;
 11. menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi;
 12. kepala lembaga non Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan; dan
 13. kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
- (4) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Dewan Pengarah dalam:
- a. menyinergikan, menyinkronkan, dan mengharmoniskan penyelesaian masalah pelaksanaan program, kegiatan, dan sasaran Penyelamatan Danau Prioritas Nasional;
 - b. menyinergikan, menyinkronkan, dan mengharmoniskan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional;
 - c. menyinergikan, menyinkronkan, dan mengharmoniskan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional; dan
 - d. merumuskan laporan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional untuk disampaikan kepada Dewan Pengarah.
- (5) Tim Pelaksana dikoordinasikan oleh Pejabat Tinggi Madya yang berasal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan

beranggotakan pejabat tinggi madya dari Kementerian/Lembaga.

- (6) Tim Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Dewan Pengarah dalam pertimbangan substansi untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan program, kegiatan, dan sasaran Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.
- (7) Tim Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur akademisi, profesi, dan/atau peneliti yang terlibat Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.
- (8) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan Tim Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Menteri.
- (9) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata kerja Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tingkat pusat diatur oleh Menteri selaku Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

Pasal 16

- (1) Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tingkat Pusat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tingkat Daerah, gubernur dan bupati/walikota membentuk Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Daerah dapat menggunakan kelembagaan pengelola Danau yang telah ada untuk bertindak sebagai Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tingkat daerah bertugas:
 - a. melaksanakan program, kegiatan, dan sasaran Penyelamatan masing-masing Danau Prioritas Nasional;
 - b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan program, kegiatan, dan sasaran Penyelamatan Danau Prioritas Nasional;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional; dan
 - d. menyampaikan laporan Penyelenggaraan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional kepada Dewan Pengarah Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional melalui Tim Pelaksana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan kerja antara Tim Penyelamatan Danau Prioritas tingkat Pusat dan Tim Penyelamatan Danau Prioritas tingkat Daerah diatur oleh Menteri selaku Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

Pasal 18

- (1) Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemberdayaan kepada Pemangku Kepentingan untuk terlibat dalam Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui kegiatan sosialisasi, konsultasi publik, dan partisipasi.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait, serta Pemangku Kepentingan.

Pasal 20

Pendanaan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan badan, lembaga, tim koordinasi, serta kelompok kerja mengenai Penyelamatan Danau yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden ini disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini, paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR ...

LAMPIRAN
 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG PENYELAMATAN DANAU
 PRIORITAS NASIONAL

SASARAN DAN PROGRAM PENYELAMATAN DANAU PRIORITAS NASIONAL

1. DANAU TOBA

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|--|--|---|---|---|------------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| Strategi 1. Program Penyelamatan Ekosistem Perairan Danau Toba (usulan sbg strategi) | | | | | | | |
| 1. | Menurunnya kualitas air Danau Toba | 1.1 Program Pemantauan Kualitas Air Danau Toba | Penertiban budidaya ikan Keramba jaring apung (KJA) | Membersihkan Danau Toba dari budidaya KJA | 10.000 KJA | KLHK, DLH, DKP Prov/Kab | Menko Maritim, BKPM, Satpol PP, POLRI |
| | | | Penghitungan Daya Dukung dan Daya Tampung dan Alokasi Beban Pencemaran Danau Toba | Pemanfaatan tidak melebihi daya dukung dan daya tampung beban pencemaran air Danau Toba | Total Phospor 10 mikrogram/liter | KLHK, Dinas LH Provinsi dan DLH Kab 7 Kabupaten | LIPI, Perguruan Tinggi |
| | | | Pembangunan reservat fauna endemik di perairan danau | Meningkatnya fauna endemik di perairan danau | Terwujudnya reservat fauna endemik | Dinas Perikanan Prov/Kab, LIPI | KLHK, KKP |
| 2. | Menurunnya kualitas air akibat polutan | 1.2 Pengendalian pencemaran air Danau Toba | Pemberian dan pengawasan izin | Limbah yang masuk ke Danau Toba, | Pengawasan dan Monev | DLH Provinsi dan DLH pada 7 kabupaten, | KLHK, Satpol PP, POLRI |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|--|---|---------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | pembuangan limbah dari beberapa sektor kegiatan | sesuai daya tampung beban dan daya dukung lingkungan | | | |
| 3. | Adanya material padat yang masuk ke Danau | 1.3 | Pengendalian sedimentasi | Pengerukan Danau Revitalisasi Danau | Pengerukan sedimen dengan memperhatikan ekosistem danau | Terkendalinya sedimentasi sebesar yang masuk dalam badan danau | Kementerian PU PR, DLH Prov/Kab | Dishub, Dinas Pertanian Prov/Kab |
| Strategi 2. Program Penyelamatan Kawasan Sempadan Danau Toba | | | | | | | | |
| 4. | Alih fungsi dan okupasi lahan | 2.1 | Penyelamatan kawasan sempadan danau | Penanaman tanaman keras dan tanaman endemik di daerah sempadan danau sebagai batas alami, perlindungan danau | Danau terlindung dari erosi | Bertambahnya tutupan lahan di sempadan | Dinas Kehutanan, KPH, BPDASHL, Kementerian BUMN | Swasta/BUMN/D (Dana CSR), Lembaga pencinta lingkungan, Perguruan Tinggi, masyarakat |
| | | | | Penetapan garis sempadan danau | Terealisasinya tata batas sempadan danau | Adanya patok dan koordinat sebagai batas garis sempadan danau | Kementerian PUPR, Kemen ATR/BPN, Balai Besar Jalan | PUPR pada 7 Kabupaten, Bappeda Provinsi Sumatera Utara dan Bappeda pada 7 Kabupaten |
| | | | | Pembangunan sarana drainase, sanitasi dan instalasi pengolahan sampah untuk kegiatan di sekitar sempadan danau | Terbangunnya sarana drainase dan sanitasi untuk kegiatan di sekitar sempadan danau | Adanya sarana drainase dan sanitasi untuk kegiatan di sekitar sempadan danau | Kementerian PUPR, Dinas PUPR | Kementerian ESDM, KLHK, Dinas LH Provinsi Sumatera Utara, Dinas LH 7 Kabupaten, Dinas Tata Kota PUPR, Pihak Swasta |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|--|--|---------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| Strategi 3. Program Penyelamatan DAS dan DTA Danau | | | | | | | | |
| 5. | Lahan kritis, erosi, banjir, dan sedimen | 3.1 | Penanganan lahan kritis, erosi, banjir, dan sedimentasi | Rehabilitasi hutan dan lahan kritis | Ditingkatkan luas hutan minimal 30% di wilayah DTA | Tercapainya luas hutan minimal 30% di wilayah DTA dan berkurangnya luas lahan kritis dibawah 26% di DTA | KLHK, BPDASHL, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan KPH, Dinas Pertanian pada 7 Prov/kab | Pihak swasta (Dana CSR), Kementan/Badan Litbang Tanah Perguruan Tinggi Masyarakat, Kelembagaan pemerhati hutan, kelompok tani, penyuluh |
| | | | | Pembuatan hutan rakyat dan Agroforestry | Meningkatnya tutupan lahan/hutan pada lahan milik rakyat dan areal Agroforestry | Tercapainya luas hutan rakyat dan Agroforestry bertambah dari kondisi eksisting dari 12% menjadi 20% | KLHK, BPDASHL, KPH | Swasta (Dana CSR), Perguruan Tinggi, Kemendes dan Daerah Tertinggal |
| | | | | Pengendalian dan Pembinaan terhadap penambang galian C | Terkendalinya dan terbinanya penambang galian C | Berkurangnya kegiatan penambangan galian C di DTA danau | Dinas Pertambangan dan Energi pada 7 daerah kabupaten, Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara | Kementerian ESDM, Kemendes dan Daerah Tertinggal, LSM, Penyuluh, Satpol PP, Swasta dan Masyarakat |
| | | | | Pembuatan cek dam, tanggul, penyalur sedimen, dan embung/dam parit di DTA | Berkurangnya sedimentasi dari DTA di badan danau | Cek dam, tanggul, penyalur sedimen, dan embung/dam parit yang | Dinas PUPR pada 7 daerah kabupaten, Dinas Kehutanan Provinsi | Swasta, NGO, PUPR, KLHK, BPDASHL, Perguruan Tinggi. |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|--|--|---------|---|--|--|---|---|--|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | | | terbangun di DTA | Sumatera Utara, KPH, | |
| 6. | Pencemaran sungai di DTA | 3.2 | Pengendalian Pencemaran sungai di DTA | Kajian Penentuan sumber pencemar yang masuk ke sungai di DTA | Teridentifikasinya tingkat beban pencemaran sungai di DTA | Terlaksananya penanganan sumber pencemaran sungai di DTA berdasarkan hasil kajian | DLH Prov, Perguruan Tinggi | KLHK, BPDASHL, LIPI. |
| 7. | Pencemaran limbah peternakan | 3.3 | Pengembangan Peternakan Ramah Lingkungan | Pengolahan dan pemanfaatan limbah peternakan | Termanfaatkannya limbah peternakan | Terolahnya limbah peternakan | Kementan, Distan pada 7 Kabupaten, dinas ESDM, Dinas peternakan | DLH Prov dan DLH pada 7 Kabupaten, Perguruan Tinggi, Penyuluh, masyarakat |
| Strategi 4. Program Peningkatan Peran dan Partisipasi Masyarakat (usulan sbg Strategi) | | | | | | | | |
| 8. | Rendahnya keterlibatan masyarakat dan belum optimalnya kearifan lokal dalam penyelamatan ekosistem danau | 4.1 | Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat | Revitalisasi kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan | Teridentifikasinya dan berkembangnya kearifan lokal | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bentuk kearifan lokal untuk mendukung kelestarian danau | Perguruan Tinggi, DLH Prov dan DLH 7 Kabupaten, Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial, (Prov dan 7 Kabupaten) | Kemensos, Kemdikbud, Kemenpar, Kemenristek & Dikti, Akademi, Koperasi, lembaga kemasyarakatan, NGO/LSM, Perguruan Tinggi, UMKM |
| Strategi 5. Mengoptimalkan pemanfaatan Danau Prioritas Nasional sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (terkait dengan KSN utk Pariwisata) | | | | | | | | |
| 9. | Belum berkembangnya sarana pariwisata danau | 5.1 | Pengembangan Infrastruktur Pariwisata Danau Berkelanjutan | Peningkatan dan pembangunan jalan lingkar luar Danau | Terkoneksinya destinasi-destinasi pariwisata melalui jalan darat | Adanya jalan penunjang pariwisata danau sepanjang 419 km | Dinas PUPR, Balai Besar Jalan, Dinas Jalan dan Jembatan (Provinsi dan 7 Kabupaten) | PUPR. Kemen Pariwisata |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|--|---|--|--|---|---|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | 5.2 | Penyediaan sarana dan prasarana pendukung objek-objek wisata | Penyediaan fasilitas umum pada objek-objek wisata | Terbangunnya 2 objek wisata dengan fasilitas umum yang lengkap/kab/tahun | 2 objek wisata / kab | Dinas PUPR (Provinsi dan 7 Kabupaten), Dinas Pariwisata (Provinsi dan 7 Kabupaten) | PUPR, Kemen Pariwisata, serta pihak lain pemanfaat EKDT, BODT |
| | | 5.3 | Pengembangan budaya sadar wisata | Pembentukan kelompok masyarakat sadar wisata | Terbentuknya 1 kelompok sadar wisata pada masing-masing kab/ tahun | 1 kelompok/ kabupaten | Dinas Pariwisata (Provinsi dan 7 Kabupaten), Dinas Sosial (Provinsi dan 7 Kabupaten) | Kemen Pariwisata, Barekraf, BODT |
| | | 5.4 | Promosi wisata Danau Toba | Pelaksanaan promosi dan potensi pariwisata Danau | Terlaksananya 4 kegiatan promosi/kab/tahun | 4 kegiatan/ kabupaten | Dinas Pariwisata (Provinsi Sumatera Utara dan Kab) | Kemen Pariwisata, Barekraf, BODT |
| | | 5.5 | Pengembangan Desa Wisata | Pengembangan potensi desa wisata di sekitar Danau | Terwujudnya 7 Desa Wisata di 7 Kabupaten | Terwujudnya realisasi pengembangan 7 desa wisata | Dinas Pariwisata (Provinsi dan 7 Kabupten), DLH Provsu dan DLH 7 kabupaten, Kepala Desa | Kemen Pariwisata, Barekraf, LPMD |

2. DANAU SINGKARAK

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | | |
|--|--|---------|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| Strategi 1. Penataan Ruang | | | | | | | | |
| 1. | Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup | 1.1. | Penataan Ruang | Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Singkarak (sebagai Kawasan Strategis Provinsi) | Pemanfaatan ruang sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung LH | Tersusunnya Perda RTR KSP Danau Singkarak | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Prov Sumbar | Dinas LH, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Pariwisata Prov Sumbar |
| | | | | Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Singkarak di tingkat Kabupaten | Pemanfaatan ruang sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung LH | Tersusunnya Perda Kab Tanah Datar dan Kab Solok tentang RDTR Kawasan Danau Singkarak di Kab Tanah Datar dan Kab Solok | Dinas PUPR Kab Tanah Datar dan Kab Solok | Dinas LH, Dinas Perikanan dan Pangan, dan Dinas Pariwisata Kab Tanah Datar dan Kab Solok |
| Strategi 2. Penyelamatan Ekosistem Perairan Danau | | | | | | | | |
| 2. | Menurunnya kualitas air danau | 2.1. | Pengendalian pencemaran air dari lahan pertanian | Pengembangan percontohan pertanian organik | Terbangunnya percontohan pertanian organik | 10 ha | Dinas Pertanian Prov Sumbar, Balitan Sukarami | Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Solok dan Kab Tanah Datar |
| | | 2.2. | Pengendalian eceng gondok | Pengembangan percontohan pengelolaan eceng gondok | Berkurangnya sebaran eceng gondok | 4 percontohan pengolahan eceng gondok | Dinas LH Kab Tanah Datar dan Dinas LH Kab Solok | KLHK, Kementerian PUPR |
| | | 2.3. | Pengendalian Pencemaran air dari perikanan budidaya dengan KJA | Penyusunan Pergub tentang perikanan budidaya dengan KJA | Terjaganya status trofik danau yang tidak melampaui daya dukung lingkungan | Pergub tersusun dan ditetapkan | Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Sumbar | Bappeda Prov Sumbar |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|----|---|---------|-----------------------------------|--|---|---|---|--|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | Pengembangan kolam ikan di sempadan | Terbangunnya kolam ikan ramah lingkungan di daratan | 20 kolam ikan ramah lingkungan di sempadan danau | Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Sumbar | Dinas Perikanan dan Pangan Kab Tanah Datar dan Kab Solok |
| | | | | Pengembangan percontohan perikanan budidaya ramah lingkungan dengan Bioflok | Terbangunnya percontohan perikanan budidaya ramah lingkungan | 5 paket perikanan darat | Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Sumbar | Dinas Perikanan dan Pangan Kab Tanah Datar dan Kab Solok |
| 3. | Banyaknya sampah di danau dan sekitar danau | 2.4. | Pengelolaan Sampah | Pengelolaan sampah di sekitar danau dan yang masuk ke danau | Terbangunnya model pengelolaan sampah | 5 unit bank sampah dilengkapi sarpras | Dinas LH Prov Sumbar, Kab Tanah Datar dan Kab Solok | KLHK, Kementerian PUPR, Dinas PUTR |
| | | | | Peningkatan peran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah | Terbentuknya kelompok masyarakat pengelola sampah | 13 kelompok masyarakat | Dinas LH Prov Sumbar | Dinas LH Kab Tanah Datar dan Kab Solok |
| 4. | Menurunnya keanekaragaman hayati | 2.5. | Pelestarian keanekaragaman hayati | Revisi Pergub tentang Perikanan Tangkap (merevisi Pergub sebelumnya, untuk penghapusan alat tangkap Bagan dan Jaring Insang yang kurang dari 1 inci) | Lestarinya ikan bilih dan spesies asli lainnya di Danau Singkarak | Tersusunnya Pergub (revisi) | Biro Hukum Setda dan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Sumbar | Dinas Perikanan dan Pangan Kab Solok dan Kab Tanah Datar |
| | | | | Penyediaan fasilitas perikanan tangkap ramah lingkungan | | 8 perahu dan 150 buah alat tangkap ramah lingkungan | Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Sumbar | Dinas Perikanan dan Pangan Kab Tanah Datar dan Kab Solok |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|--|---|---------|---------------------------|--|---|---|--|---|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | Pengembangan reservat di danau, domestikasi, pembenihan dan restocking ikan asli Danau Singkarak | | Terlaksana hingga tersedia benih ikan lokal untuk restocking dan budidaya | Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Sumbar | Dinas Perikanan dan Pangan Kab Tanah Datar dan Kab Solok, PLN Sektor Pembangkitan Bukittinggi |
| | | | | Studi Keanekaragaman hayati dan perikanan tangkap | Tersedianya acuan pelestarian keanekaragaman hayati dan pola perikanan tangkap yang tepat | Terlaksananya studi | BKSDA dan Balitbang | Dis Perikanan, Prov Sumbar, PT, PLN, |
| Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Sempadan Danau | | | | | | | | |
| 5. | Pemanfaatan lahan sempadan danau yang tidak tertata, dan berdampak mencemari/ merusak danau | 3.1. | Penataan kawasan sempadan | Penentuan dan penetapan batas sempadan | Pemanfaatan sempadan memperhatikan batas dan fungsinya sebagai kawasan lindung | Tersedianya dasar peraturan dan acuan batas dan pemanfaatan sempadan | BWS Wilayah V, Dinas PUTR Provinsi Sumbar | Bappeda dan Dinas LH Provinsi Sumbar, Bpdas Indragiri Rokan |
| | | | | Penertiban bangunan tak berizin | Pemulihan fungsi sempadan danau | Kawasan sempadan danau bebas dari bangunan tak berizin | Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar dan Kabupaten terkat | Dinas LH Provinsi Sumbar |
| | | | | Penerapan Izin Lingkungan dan IMB | Terkendalnya pemanfaatan sempadan danau | Seluruh kegiatan di sempadan memiliki Izin Lingkungan/ IMB sebagai dasar pemenuhan kewajibannya | Dinasi LH dan dinas terkait di Kab Tanah Datar dan Kab Solok | Dinas LH Provinsi Sumbar |

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | | |
|--|--|---------|------------------------------|--|--|--|---|-----------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| Strategi 4. Penyelamatan Daerah Tangkapan Air | | | | | | | | |
| 6. | Lahan kritis, erosi, banjir, dan sedimen | 4.1. | Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Penyusunan Pergub tentang Penanganan lahan kritis bekas tambang galian C | Berkurangnya lahan kritis dan longsor | Tersusunnya Pergub tentang Penanganan lahan kritis bekas tambang | Dinas ESDM dan Dinas Kehutanan Prov Sumbar, BPDAS Indragiri Rokan | Dinas LH Prov Sumbar |
| | | | | Reboisasi hutan rakyat dan Penghijauan Lingkungan | Berkurangnya lahan kritis dan mempertahankan luas hutan di DTA | Ditanamnya 10.000 batang pohon | BPDAS Indragiri Rokan | Dinas Kehutanan Prov Sumbar |
| | | | | Rehabilitasi lahan sempadan danau | Tidak terjadinya longsor di sempadan danau | Ditanamnya 2.500 batang pohon di sempadan danau | BPDAS Indragiri Rokan | Dinas Kehutanan Prov Sumbar |
| | | | | Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air | Berkurangnya sedimentasi badan air | Terbangunnya 25 unit bangunan KTA | BPDAS Indragiri Rokan | Dinas Kehutanan Prov Sumbar |
| | | | | Rehabilitasi telaga | Fungsi telaga sebagai sumber air pertanian dan perkebunan terjaga | Terrehabilitasin ya 16 telaga | Dinas Kehutanan Prov Sumbar | Dinas PUTR Prov Sumbar |
| | | | | Peningkatan peran serta masyarakat dalam RHL | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam RHL | Dilaksanakann ya penyuluhan | BPDASH Indragiri Rokan | Dinas Kehutanan Prov Sumbar |
| Strategi 5. Peningkatan Peran Para Pihak | | | | | | | | |
| 7. | Perlu ditingkatkannya peran para pihak | 5.1. | Imbal Jasa Lingkungan | Kajian dan Pengembangan Pola IJL | Meningkatnya peran para pihak dalam penyelamatan danau khususnya dari para pemanfaat jasa lingkungan danau | Dilaksanakann ya kajian dan perumusan pola IJL yang tepat | BPDAS | PT, PLN, Balitbang |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|----------------|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | 5.2. | Pengembangan Sistem Informasi | Peningkatan akses informasi bagi para pihak | Terwujudnya peran para pihak sesuai dengan program yang dilaksanakan | Tersedianya akses informasi bagi para pihak | Bappeda, Dis LH, Balitbang | BPDAS, PLN, PT |

DRAFT

3. DANAU MANINJAU

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | | |
|---|--|---------|--------------------------|--|--|--|--|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| Strategi 1. Penataan Ruang | | | | | | | | |
| 1. | Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup | 1.1. | Penataan Ruang | Penyusunan Rencana Zonasi/RDTR Kawasan Danau | Tertatanya pemanfaatan ruang di kawasan danau | Tersusunnya Perda Zonasi | Dinas PUPR Prov Sumbar | BAPPEDA, BPN, PUPR, Dinas LH, Camat dan Pemerintah Nagari |
| | | | | Pemanfaatan ruang | Pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya | Pemanfaatan ruang sesuai zonasi | Distan, Disbun, DPKP, KPHL, BKSDA, PUTR, Pem Nagari, PLTA, Dispar, DPMPTSP | Camat, Bappeda, BPN, Swasta |
| | | | | Penertiban pemanfaatan ruang | Pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya | Tidak ada pemanfaatan ruang yang illegal | Satpol PP, PTSP, KPHL, BKSDA, Wali Nagari | Distan, Disbun, DKP, Camat, LSM |
| | | | | Penegakan hukum pemanfaatan ruang | Dipatuhinya regulasi pemanfaatan ruang | Diterapkannya insentif-disinsentif | Satpol PP, Polisi, Jaksa, KPHL, BKSDA | Dinas Prizinan, Camat, Pem Nagari, LH dan swasta |
| Strategi 2. Penyelamatan Ekosistem Perairan Danau | | | | | | | | |
| 2. | Menurunnya kualitas air danau | 2.1. | Pengelolaan Kualitas Air | Penyusunan status mutu air danau | Kualitas air danau sesuai peruntukan dan daya dukung daya tampung lingkungan | Tersusunnya status mutu air danau | LH, LIPI | Dis LH, Bappeda |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|----|-----------------------------------|---------|--|--|--|---|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | Penyediaan/pem bangunan sarana dan prasarana atau teknologi pemulihan kualitas air danau | Terpulihkannya kualitas air danau | Tersedianya sarana prasarana kincir air dan air mancur untuk aerasi, nano bubble dan wetland bioremediasi | LH, LIPI | LH, Pariwisata, DPKP, LIPI |
| | | 2.2. | Pengendalian Pencemaran air dari perikanan budidaya dengan KJA | Penyusunan Pergub tentang perijinan dan disain KJA | Berkurangnya jumlah KJA hingga sesuai daya dukung dan daya tampung danau | Tersusunnya Pergub | Dinas Perikanan dan Pangan Kab. Agam | |
| | | | | Pengurangan jumlah KJA | Berkurangnya jumlah KJA hingga sesuai daya dukung dan daya tampung danau | Dari 17.635 petak KJA menjadi 6.000 petak KJA | Dinas Perikanan dan Pangan Kab. Agam | Satpol PP, Camat, Walinagari, Petani KJA, swasta |
| | | | | Pengurangan jumlah pakan ikan | Berkurangnya pencemaran danau | Dari 800 ton menjadi 200 ton per bulan | Dinas Perikanan dan Pangan Kab. Agam | Camat, Walinagari, Petani KJA, swasta |
| | | | | Pemanfaatan teknologi pemberian pakan ikan | Berkurangnya pencemaran danau | Tersedianya teknologi pemberian pakan ikan | DPKP, Kominfo, DLH | |
| | | | | Pengembangan pola budidaya multitronik dan rekayasa habitat | Berkurangnya pencemaran danau | Terbangunnya 8 unit budidaya multitronik dan rekayasa habitat | LIPI dan Balitbang | Dis Perikanan, PT, LSM, Distan, Camat, Walinagari, Masyarakat |
| 3. | Sebaran sampah dan gulma di danau | 2.3. | Pengendalian sampah dan gulma air di danau | Pengambilan sampah dan gulma air | Berkurangnya sampah dan gulma air di danau | Dari 15 ha menjadi 5 ha | Dinas LH | Petani KJA, Camat, Pem Nagari, BPBD, Perhubungan, Dinsos, LSM |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|----|---|---------|--|---|---|---|---------------------------------------|---|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | Pengadaan alat pembersih dan pengolah sampah dan eceng gondok | Berkurangnya sampah dan gulma air di danau | Seluruh sampah dan eceng gondok yang diambil terkelola | KLHK, Kemen PUPR | DLH, PUTR |
| 4. | Pencemaran air danau dari kegiatan di sekitar danau | 2.4. | Pengendalian Pencemaran Air dari kegiatan di sekitar danau | Penertiban ijin usaha di sekitar danau | Berkurangnya sumber pencemaran di sekitar danau | Kegiatan usaha di sekitar danau mematuhi perijinan | Pol PP, DPMPST, LH, Perindagkop, DPKP | Pariwisata, Camat, Walinagari |
| | | | | Pembangunan IPAL komunal sanitasi | Berkurangnya sumber pencemaran di sekitar danau | Terbangunnya IPAL komunal | Kemen PUPR | Perkim, LH, PU, Kesehatan |
| 5. | Sedimentasi danau | 2.5. | Pengendalian sedimen | Studi revitalisasi danau (analisis tipe sedimen) | Sedimentasi danau dapat dikendalikan | Tersedia data jenis sedimen | BWS V | Bappeda, PT, Lipi, DisPU Agam, Kem PUPR, Pem Nagari |
| | | | | Penyedotan sedimen | Sedimen di danau berkurang | Sisa pakan ikan 17.889 ton dapat disedot dan terkelola pada disposal area | BWS V | Dis PU, DLH, Kem PUPR, Pem Nagari |
| 6. | Penurunan keanekaragaman hayati | 2.6. | Pelestarian keanekaragaman hayati | Pembuatan reservat ikan dan domestikasi ikan bada | Lestarnya ikan lokal dan endemik | Terwujud dan terkelolanya area reservat dan domestikasi ikan | Dis Perikanan dan Kelautan, LIPI | PT, LSM, swasta, masyarakat |
| | | | | Restocking ikan lokal dan endemik | Lestarnya ikan lokal dan endemik | Terlaksananya restocking ikan lokal dan endemik | Dis Perikanan dan Kelautan, LIPI | PLTA, LIPI, PT, LSM, swasta, masyarakat |
| | | | | Penyediaan sarpras perikanan tangkap secara | Terlaksananya perikanan tangkap yang ramah lingkungan | Tersedianya 25 unit peralatan tangkap ikan | Dis Perikanan dan Kelautan, LIPI | Kem KP, PLTA, LSM, masyarakat, swasta |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|--|---|---------|---|---|--|--|---|---|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | ramah lingkungan | | ramah lingkungan | | |
| 7. | Perlu ditingkatkannya sistem tata air/sumber daya air | 2.7 | Peningkatan sistem tata air/sumber daya air | Inventarisasi pemanfaatan air danau | Pemanfaatan air danau sesuai daya dukung lingkungan | Tersedianya data pemanfaatan air danau | Bappeda | LIPI, PT, LSM, masyarakat |
| | | | | Pengaturan pintu air PLTA | Tercapainya keseimbangan hidrologi | Elevasi danau seimbang dan tinggi muka air danau terkendali | BWS V | LIPI |
| | | | | Revitalisasi hulu DAS dengan membongkar kolam ikan masyarakat | Normaliasi hulu DAS | Peniadaan kolam ikan masyarakat di hulu DAS dari 70 unit menjadi tidak ada | BWS V, Dis PU Sumbar | Dis PUPR Kab Agam |
| Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Sempadan Danau | | | | | | | | |
| 8. | Pemanfaatan lahan sempadan danau yang tidak tertata, dan berdampak mencemari/ merusak danau | 3.1. | Penataan kawasan sempadan | Penentuan dan penetapan batas sempadan | Pemanfaatan sempadan memperhatikan batas dan fungsinya sebagai kawasan lindung | Tersedianya dasar peraturan dan acuan batas dan pemanfaatan sempadan | BWS Wilayah V, Dinas PUTR Provinsi Sumbar | Bappeda dan Dinas LH Provinsi Sumbar |
| | | | | Penyusunan rencana pemanfaatan sempadan | Pemanfaatan sempadan sesuai peruntukan | Tersusunnya rencana pemanfaatan sempadan | Dinas PUPR Kab Agam, BWS V | Bappeda, Dinas LH, Camat, Walinagari, Satpol PP |
| | | | | Pembersihan bangunan di sempadan | Tertatanya bangunan di sempadan danau | Bangunan di sempadan efektif dan | Dinas PUPR, Satpol PP Kab Agam | Bappeda, Dis LH, Camat, Walinagari, masyarakat |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|---|---|---------|--|--|---|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | | | sesuai peruntukan | | |
| | | | | Pengendalian pemanfaatan sempadan | Terlaksananya wasdal pemanfaatan sempadan | Pemanfaatan sempadan sesuai regulasi | Dinas PUPR, Satpol PP Kab Agam | Bappeda, Dis LH, Camat, Walinagari, masyarakat |
| Strategi 4. Penyelamatan Daerah Tangkapan Air | | | | | | | | |
| 9. | Lahan kritis, erosi, banjir, dan sedimen | 4.1. | Rehabilitasi Hutan dan Lahan | RHL secara vegetatif | Penurunan lahan kritis di DTA danau | Terehabilitasin ya 1073 ha lahan sangat kritis, 1308 ha lahan kritis dan 3020 ha lahan agak kritis | BPDASHL, KPHL, BKSDA, Distn, Disbun | Bappeda, Camat, Walinagari, Masyarakat, LSM dan swasta |
| | | | | Peningkatan peran serta masyarakat dalam RHL | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam RHL | Dilaksanakan nya penyuluhan dan dilibatkannya masyarakat dalam RHL (9 nagari, 7000 siswa, dan 120 pengantin) | BPDASH Indragiri Rokan | Dinas Kehutanan Prov Sumbar |
| Strategi 5. Pemantauan, Evaluasi dan Pengembangan Basis Data dan Sistem Informasi | | | | | | | | |
| 10 | Diperlukannya peningkatan monev serta pengembangan basis data dan informasi | 5.1. | Pemantauan dan evaluasi | Monitoring dan evaluasi implementasi pengelolaan danau | Terlaksananya program penyelamatan danau secara efektif dan efisien | Tersedianya data hasil monev | Bappeda, DLH | OPD, Camat, Walinagari |
| | | 5.2. | Pengembangan Basis Data dan Sistem Informasi | Pengembangan basis data | Terlaksananya program penyelamatan danau secara | Tersedianya peta biofisik dan sosial ekonomi | Bappeda | OPD, LSM, PT, LIPI. KLHK |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|---|---|---------|------------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|---|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | | efektif, efisien dan terpublikasi dengan baik | lingkungan danau | | |
| | | | | Pembangunan sistem informasi | Terlaksananya program penyelamatan danau secara efektif, efisien dan terpublikasi dengan baik | Terbangunnya sistem informasi berbasis teknologi | Diskominfo | Bappeda, LIPI, PT |
| Strategi 6. Peningkatan Peran Para Pihak | | | | | | | | |
| 11 | Diperlukannya peran dan keterlibatan para pihak | 6.1. | Imbal Jasa Lingkungan | Pengembangan pola dan penerapan imbal jasa lingkungan | Penyelamatan danau diukung oleh seluruh pihak khususnya pemanfaata jasa lingkungan danau | Tersedianya pola dan diterapkannya IJL | DLH | BPDASHL, Camat, Walinagari, LSM, masyarakat |
| | | 6.2. | Peningkatan peran serta masyarakat | Pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat | Masyarakat mandiri dan berperan aktif | Terlaksananya pengembangan kapasitas kelembagaan bagi kelompok masyarakat di seluruh nagari di sekitar danau | DPMPTSP, Naker, Penyuluh, LSM, PT | OPD, Badan Pemberdayaan Masyarakat |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|--|--|---------------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | Penyediaan sarana prasarana untuk peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan danau (a.l. melalui alih usaha masyarakat menjadi perikanan darat, mina padi, peternakan, pembuatan kerajinan, kuliner, ekowisata, pengolahan limbah/sedimen dll secara ramah lingkungan) | Masyarakat mandiri dan berperan aktif | Tersedianya sarana prasarana dan demplot serta terlaksananya pendampingan bagi kelompok masyarakat di seluruh nagari | Dis Perikanan dan Pangan, Dis Pariwisata, Disperindagkop, DPMPST | LH, Parpora, PT, swasta, masyarakat |

4. DANAU KERINCI

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | | |
|---|--|---------|--------------------------------|--|---|---|-------------------------------|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| Strategi 1. Penataan Ruang dan Tata Kelola Danau | | | | | | | | |
| 1. | Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup | 1.1. | Penataan Ruang | Penyusunan RTR Kawasan Danau Kerinci | Pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung LH | Tersusun, ditetapkan, disosialisasikan dan diimplementasi - kannya RTR Kawasan Danau Kerinci | BPPEDA, Dinas PUPR | Dinas LH |
| | | | | Penyusunan zonasi pemanfaatan ekosistem perairan danau (untuk perlindungan maupun pemanfaatan, termasuk untuk pembatasan KJA) | Pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung LH | Tersusun, ditetapkan, disosialisasikan dan diimplementasi - kannya Zonasi perairan Danau Kerinci | Bappeda, Dinas PUPR, Dinas LH | Dinas Perikanan, LIPI, Perguruan Tinggi |
| 2. | Perlu dikembangkannya tata kelola danau | 1.2. | Pengembangan Tata Kelola Danau | Penyusunan (termasuk mereview peraturan yang ada), Sosialisasi, dan Implementasi Perda tentang Pengelolaan Danau Kerinci (termasuk pengendalian kegiatan yang merusak ekosistem, monev, sanksi, perijinan, jasa lingkungan dan peningkatan | Terwujudnya pengelolaan danau berkelanjutan | Tersusun, ditetapkan, disosialisasikan dan diimplementasi -kannya Perda Pengelolaan Danau Kerinci lintas sektor dan lintas wilayah (mencakup Kab Kerinci, Merangin, Bungo, Kota dan Sungai Penuh) | Bappeda, Dinas LH, Dinas PUPR | Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, Dinas ESDM, dan lainnya |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|--|---------------------------------|---------|----------------------------------|--|---|---|-------------------------------------|---|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | peran masyarakat) | | | | |
| Strategi 2. Penyelamatan Ekosistem Perairan Danau | | | | | | | | |
| 3. | Menurunnya kualitas air danau | a. | Pengelolaan kualitas air danau | Penetapan baku mutu dan status trofik air danau | Dicapainya kualitas air yang baik dan pemanfaatan danau sesuai dengan daya dukung daya tampung lingkungan | Ditetapkan dan diimplementasi-kannya baku mutu dan status trofik air sebagai acuan pengelolaan danau | Dinas LHK, KLHK Dinas PUPR | Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas KKP, Dinas Pariwisata |
| | | b. | Pengendalian pencemaran air | Pembangunan instalasi pengolahan limbah domestik | Berkurangnya beban pencemaran air | Dibangunnya instalasi pengolahan limbah domestik | Dinas PUPR, Dinas LHK | Bappeda, KLHK |
| 4. | Penurunan keanekaragaman hayati | 2.3. | Pelestarian spesies asli/endemik | Penyuluhan dan pendampingan perikanan tangkap ramah lingkungan, serta penertiban perikanan tangkap yang tidak ramah lingkungan | Lestarinya spesies asli/endemik | Dilaksanakan-nya penyuluhan dan pendampingan perikanan tangkap ramah lingkungan, serta penertiban perikanan tangkap yang tidak ramah lingkungan | Dinas Kelautan dan perikanan, Setda | DLH, Perguruan Tinggi, LIPI |
| | | | | Pembangunan reservat pada zona konservasi ikan asli/endemik danau | Lestarinya spesies asli/endemik | Dibangunnya reservat ikan asli/endemik | Dinas Kelautan dan perikanan, DLH | Perguruan Tinggi, LIPI |
| | | | | Restocking ikan asli/endemik | Lestarinya spesies asli/endemik | Terlaksananya restocking ikan asli/endemik | Dinas Kelautan dan | Perguruan Tinggi, LIPI |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|--|--|---------|--|--|--|---|---|------------------------|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | | | | perikanan, DLH | |
| 5. | Belum dikembangkannya potensi PLTA | 2.4. | Pengembangan potensi PLTA ramah lingkungan | Pelaksanaan kajian, potensi air danau untuk PLTA | Terwujudnya PLTA/mikrohidro ramah lingkungan | Dilaksanakannya kajian pemanfaatan air danau untuk PLTA | Dinas ESDM, Dinas LH, Dinas PUPR | Bappeda |
| | | | | Pembangunan PLTA mikrohidro di danau | Terwujudnya PLTA/mikrohidro ramah lingkungan | Dilaksanakannya pembangunan PLTA mikrohidro | Dinas ESDM, Dinas LH, Dinas PUPR | Bappeda |
| Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Sempadan Danau | | | | | | | | |
| 6. | Pemanfaatan lahan sempadan danau yang tidak tertata, dan berpotensi mencemari/ merusak danau | 3.1. | Penataan kawasan sempadan | Penetapan batas sempadan danau Kerinci | Pemanfaatan sempadan memperhatikan batas dan fungsinya sebagai kawasan lindung | Ditetapkannya batas sempadan Danau Kerinci | Bappeda, BWS, Dinas PU | BPN, Dinas LHK |
| | | | | Pembangunan greenbelt dengan penanaman vegetasi di sekeliling danau dengan tanaman yang sesuai | Mencegah erosi ke danau, meningkatkan resapan air, serta agar pemanfaatan sempadan memperhatikan batas dan fungsinya | Terlaksananya pembangunan greenbelt dengan tanaman yang sesuai | BWS, Dinas PUPR, Dinas LH, Dinas Kehutanan, BPDASHL | Bappeda |
| 7. | Banyaknya sampah di sekitar danau | 3.2. | Pengelolaan sampah | Penyediaan sarana prasarana dan pembangunan unit pengolahan sampah | Terkelolanya sampah di sekitar danau | Tersedianya sarana prasarana dan terbangunnya unit pengolahan sampah di 15 desa | Dinas PUPR, Dinas LHK | Dinas Kesehatan, KLHK |
| | | | | Penertiban sampah wisatawan | Meningkatnya perilaku bersih lingkungan | Dilakukannya penertiban | Dinas Pariwisata | Dinas PUPR, Dinas LHK, |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|--|--|---------|---|---|---|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | | | sampah wisatawan | | Dinas Kesehatan |
| | | | | Pengembangan sistem manajemen/tata kelola persampahan di sekitar danau | Terkelolanya sampah di sekitar danau | Dikembangkan -nya sistem manajemen/tat a kelola persampahan | Dinas PUPR, Dinas LHK | Dinas Kesehatan, KLHK |
| Strategi 4. Penyelamatan Daerah Tangkapan Air | | | | | | | | |
| 8. | Lahan kritis, erosi, banjir dan sedimentasi | 4.1. | Rehabilitasi Hutan dan Lahan di DTA danau | Pelaksanaan RHL vegetatif atau reboisasi dengan tanaman MPTS | Berkurangnya erosi dan aliran permukaan | Terlaksananya reboisasi di lahan kritis di DTA danau. Saat ini luas lahan sangat kritis 2.623,50 ha ((2,81%), kritis 24.840,74 ha (26,58%), dan agak kritis 44.53,88 ha (47,66%). | BPDASHL, Dinas Kehutanan | Dinas Pertanian, Dinas LH, Dinas PUPR |
| | | | | Pelaksanaan RHL sipil teknis dengan pembuatan bangunan pengendali erosi/sedimen | Berkurangnya erosi/sedimentasi | Terlaksananya pembuatan bangunan pengendali sedimen | BPDASHL, Dinas Kehutanan | Dinas Pertanian, Dinas LH, Dinas PUPR |
| 9. | Pencemaran dan kerusakan lahan akibat kegiatan pertanian yang tidak ramah lingkungan | 4.2. | Pengembangan pertanian ramah lingkungan | Pengembangan Desa Organik melalui pertanian yang menggunakan pupuk organik | Berkurangnya buangan bahan kimia ke perairan (saat ini status trofik Danau Kerinci adalah eutrof) | Terlaksananya pertanian organik di 15 desa | Dinas Pertanian | Dinas LH, Dinas Kehutanan, Dinas PUPR |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|---|--|---------|-----------------|---|---|--|---|-----------------------------|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | Penerapan pertanian yang menerapkan prinsip konservasi tanah dan air | Berkurangnya erosi dari lahan pertanian (secara umum pertanian di DTA Danau Kerinci berpola ladang berpindah sehingga 42% DTA danau merupakan belukar sisa lahan pertanian) | Diterapkannya pertanian di sekitar danau yang menerapkan prinsip konservasi tanah dan air di 15 desa | Dinas Pertanian, DLH | Bappeda, Perguruan Tinggi |
| Strategi 5. Pemantauan, Evaluasi dan Pengembangan Basis Data dan Sistem Informasi | | | | | | | | |
| 10 | Perlu ditingkatkannya pemantauan, evaluasi serta basis data dan sistem informasi | 5.1. | Penyediaan data | Pemantauan dan evaluasi kondisi danau secara rutin (meliputi morfologi, hidrologi, hidrobiologi, kualitas air danau, debit dan kualitas air sungai inlet, jumlah dan sebaran sedimentasi, kondisi dan status ekosistem, keanekaragaman hayati, pemanfaatan air, karakteristik morfometri, neraca LH, kondisi DAS dan DTA) | Tersedianya data dan informasi bagi pengelolaan danau | Dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi kondisi danau | Bappeda, Dinas LH, BWS, Dinas PUPR, BPDASHL | DKP, LIPI, Perguruan Tinggi |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|---|---|---------|---|--|--|---|--|--|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | 5.2. | Pengembangan pusat data dan sistem informasi | Pengumpulan data dan informasi, penyajian data dan informasi (uraian, tabular maupun peta) serta pembuatan database dan sistem informasi pengelolaan danau | Tersajinya data dan terbangunnya sistem informasi | Dilaksanakannya pengumpulan dan penyajian data dan informasi, serta pembangunan database dan sistem informasi pengelolaan danau | Bappeda, BWS, BPDASHL, Dinas LH Prov dan Kab | Perguruan Tinggi |
| Strategi 6. Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Koordinasi dan Peran Para Pihak | | | | | | | | |
| 11 | Perlu dikembangkannya kelembagaan dan ditingkatkannya koordinasi dan peran para pihak | 6.1. | Pengembangan koordinasi antar pihak dalam pengelolaan danau | Pengembangan pola, pembentukan tim dan pelaksanaan koordinasi antar pihak dalam pengelolaan Danau Kerinci | Meningkatnya koordinasi para pihak dalam pengelolaan danau | Dilaksanakannya pengembangan pola, pembentukan tim dan pelaksanaan koordinasi antar pihak dalam pengelolaan danau | Bappeda Provinsi | Bappeda Kab, Dinas terkait Prov dan Kab |
| | | 6.2. | Peningkatan peran para pihak | Peningkatan kapasitas institusi pemerintah | Meningkatnya kapasitas institusi pemerintah | Terlaksananya peningkatan kapasitas institusi pemerintah | Bappeda Provinsi | Bappeda Kab, Dinas Prov dan Kab |
| | | | | Pembinaan dan penggiatan kelembagaan masyarakat | Meningkatnya peran para pihak | Terlaksananya pembinaan dan penggiatan kelembagaan masyarakat di 15 desa | Bappeda, Dinas LH | Dinas PUPR, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Perguruan Tinggi, LSM, masyarakat, dunia usaha |

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|---|-------------------------------|---|---------------------------------|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | Pembentukan dan penggiatan Forum Pemuda dalam pengelolaan danau | Meningkatnya peran para pihak | Terlaksananya pembentukan dan penggiatan Forum Pemuda dalam pengelolaan danau | Bappeda, Dinas LH | Dinas PUPR, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Perguruan Tinggi, LSM |
| | | | Penguatan kelembagaan dan peningkatan peran masyarakat adat | Meningkatnya peran para pihak | Penguatan kelembagaan dan peningkatan peran masyarakat adat | Bappeda, Dinas Sosial, Dinas LH | Dinas PUPR, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Perguruan Tinggi, LSM |

5. DANAU RAWADANAU

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|----------------------------|--------------|---------|----------|------------------|----------------------------|------------------|-----------|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| Strategi 1. Penataan Ruang | | | | | | | |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|---|--|---------|--|--|--|--|---------------------------|---|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| 1. | Belum disesuaikan RDTR DAS Cidanau sebagai Kawasan Strategis Provinsi Banten | 1.1. | Penataan Ruang | Penyusunan dan Implementasi RDTR DAS Cidanau sebagai Kawasan Strategis Prov Banten | Pemanfaatan ruang berkelanjutan | Tersedianya dan diimplementasikannya RDTR | BAPEDA Banten | Dinas PUPR Banten |
| Strategi 2. Penyelamatan Ekosistem Perairan Danau | | | | | | | | |
| 2. | Penurunan kualitas air dan eutrofikasi | c. | Pengelolaan kualitas air | Penyusunan SK Gubernur tentang Baku Mutu dan Status Trofik Rawadanau | Terkelolanya kualitas air | Terbit dan diimplementasikannya SK Gubernur tentang Baku Mutu Air dan Status Trofik Rawadanau | DLH Prov/Kab | KLHK |
| | | 2.2. | Pengendalian pencemaran air dari pertanian | Pengembangan pertanian yang menerapkan penanganan residu pupuk dan pestisida | Meningkatnya kualitas air | Terlaksananya pengembangan pertanian yang menerapkan penanganan residu pupuk dan pestisida di 10 desa (2 desa per tahun) | BBKSDA, DLHK Banten, KLHK | DLH Kab Serang, DLHK Kab Pandeglang, PT KTI |
| | | 2.3. | Pengelolaan gulma air | Pembabatan gulma dan reswamping | Berkurangnya gulma air | Terlaksananya pembabatan gulma dan reswamping di Rawadanau seluas 500 ha | BBKSDA | PT KTI |
| Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Sempadan dan Daerah Tangkapan Air | | | | | | | | |
| 3. | Kerusakan dan Perambahan Kawasan (Cagar Alam Rawa Danau) | 3.1. | Peningkatan pengelolaan dan pengamanan kawasan (Cagar Alam Rawa Danau) | Penyusunan Pergub tentang Pengelolaan DAS Terpadu dan Jasa Lingkungan di Cidanau | Pengelolaan Cagar Alam Rawa Danau yang berkelanjutan | Tersusunnya Pergub tentang Pengelolaan DAS Terpadu dan Jasa Lingkungan di Cidanau | Biro Hukum Prov Banten | DLHK Prov Banten |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|------------------------------|---|---|--|---------------------------|---|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | Operasi pengamanan represif mandiri/fungsional, patroli pengamanan melibatkan masyarakat, pemeliharaan pal batas, dan kegiatan Mitra Polhut | Berkurangnya tekanan terhadap kelestarian Cagar Alam Rawa Danau | Terlaksananya 5 paket operasi pengamanan (1 paket per tahun), 50 kali patroli pengamanan (10 kali dalam setahun), 40 km pemeliharaan pal batas (8 km per tahun), dan 5 paket kegiatan Mitra Polhut (1 paket per tahun) | BBKSDA | DLHK Banten |
| | | | | Pengumpulan bahan keterangan (data dan fakta) pelanggaran hukum | Berkurangnya tekanan terhadap kelestarian Cagar Alam Rawa Danau | Diperolehnya 10 paket bahan keterangan (data dan fakta) | BBKSDA | DLHK Banten |
| | | 3.2. | Rehabilitasi hutan dan lahan | Mobilisasi dana jasa lingkungan dan identifikasi lokasi KTH potensial | Terehabilitasinya DTA atau Kawasan Cagar Alam Rawa Danau | Teridentifikasinya lokasi KTH seluas 250 ha | BPDASHL | DLHK Banten |
| | | | | Pengembangan budidaya tanaman bawah tegakan, agroforestri dan pembuatan bangunan sipil teknis pengendali erosi (dam penahan dan gully plug) | Berkurangnya lahan kritis dan menurunnya laju erosi/sedimentasi | Terlaksananya budidaya tanamana bawah tegakan seluas 30 ha, agroforestri seluas 200 ha, dan pembuatan bangunan sipil teknis untuk pengendali erosi sebanyak 125 unit | DLHK Banten, BBKSDA, KLHK | BPDASHL, PT KTI, DLH Kab Serang, DLH Kab Pandeglang |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|--|---|---------|---------------------------------------|--|---|--|---------------------------|---|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| 4. | Perlu ditingkatkannya pengelolaan sampah | 3.3. | Pengelolaan sampah | Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah | | Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di 60 desa (12 desa pertahun) di DTA Rawa Danau | BBKSDA, KLHK, DLHK Banten | DLH Kab Serang, DLHK Kab Pandeglang, PT KTI |
| Strategi 4. Pendataan, Pemantauan dan Evaluasi, Pengembangan Data dan Informasi dan Penelitian | | | | | | | | |
| 5. | Belum terbaharunya data dan informasi Cagar Alam Rawa Danau | 4.1. | Pengembangan basis data dan informasi | Inventarisasi potensi kawasan cagar alam | Tersedianya data dan informasi bagi pengelolaan Cagar Alam Rawa Danau | Terlaksananya inventarisasi dan data terbaharui setiap tahun | BBKSDA | DLHK Banten |
| | | | | Perbaharuan data dan pengembangan e-library Cagar Alam Rawa Danau | Tersedianya data dan informasi bagi pengelolaan Cagar Alam Rawa Danau | Terlaksananya perbaharuan data dan pengembangan e-library Cagar Alam Rawa Danau | BPDASHL | DLHK Banten |
| | | | | Pembuatan dan pemeliharaan papan informasi tentang Cagar Alam Rawa Danau | Tersedianya data dan informasi bagi pengelolaan Cagar Alam Rawa Danau | Tersedianya 50 papan informasi (10 papan per tahun) | BBKSDA | DLHK Banten |
| | | | | Pemantauan kualitas air di 8 sungai di Sub DAS Cidanau dan Cagar Alam Rawa Danau | Tersedianya data dan informasi bagi pengelolaan Cagar Alam Rawa Danau dan Cidanau | Terlaksananya penelitian dan pemantauan kualitas air di 60 desa | BBKSDA, KLHK, DLHK Banten | DLH Kab Serang, DLH Kab Pandeglang dan PT KTI |
| | | 4.2. | Dukungan riset | Penelitian Hidrologi DAS Cidanau | Tersedianya acuan pengendalian erosi berdasarkan hidrologi DAS | Terlaksananya 5 penelitian hidrologi (1 kali dalam setahun) | Bappeda Banten | BPDASHL dan PT KTI |
| Strategi 5. Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Peran Para Pihak | | | | | | | | |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--|---------|-------------------------|--|---|--|------------------------|--|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| 6. | Perlu dikembangkannya kelembagaan dan ditingkatkannya peran para pihak | 5.1. | Pembinaan Masyarakat | Pembentukan dan pembinaan kelompok masyarakat, kader konservasi dan anak sekolah dalam pengelolaan sumber daya alam di kawasan Cagar Alam Rawa Danau | Meningkatnya peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam di kawasan Cagar Alam Rawa Danau | Terbinanya 3 kelompok masyarakat, 5 kelompok studi banding, 5 angkatan (30 orang) kader konservasi, 5 kegiatan penyuluhan di sekolah (50 orang per kegiatan) | BBKSDA | DLHK Banten, DLH Pandenglang, DLH Serang |
| | | 5.2. | Peningkatan peran forum | Penyusunan SK Gubernur tentang review Forum | Meningkatnya peran para pihak | Terbitnya SK Gubernur tentang FKDC | Biro Hukum Prov Banten | DLHK Banten |
| | | | | Koordinasi dan fasilitasi Forum | Meningkatnya peran para pihak | Terlaksana 60 paket kegiatan forum | BPDASHL | DLHK Banten |

6. DANAU RAWAPENING

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|---|---|---------|--|--|---|--|---|--|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| Strategi 1. Program Penyelamatan Kawasan Sempadan Danau Rawapening (Sesuaiakan dengan Strategi) | | | | | | | | |
| 1. | Konflik pemanfaatan dan Alih fungsi lahan sempadan Danau Rawapening | 1.1 | Penyelamatan Lahan Sempadan Danau Rawapening | Penyusunan zonasi lahan sempadan danau dan penentuan | Terwujudnya penetapan zonasi lahan sempadan danau dan penentuan garis | Zonasi lahan sempadan danau dan garis batas sempadan | Pemda Provinsi, PUPR, BBWS Pemali Juana | Bappeda Prov, BPN Kab. Semarang Pemkab |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|---|--|---------|-----------------------------------|--|---|---|---|---|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | garis sempadan danau | sempadan danau | | | Semarang, Kota Salatiga |
| | | | | Penyusunan zonasi badan air danau (enceng gondok, KJA, pariwisata, PLTA, air baku) | Terwujudnya zonasi badan air | Zonasi pemanfaatan badan air danau | Pemda Provinsi, PUPR, BBWS Pemali Juana | Bappeda Prov, DLH Prov, BPN Kab. Semarang Pemkab Semarang, Perguruan Tinggi |
| 2. | Tingginya tingkat erosi di DTA danau | 1.2 | Penyelamatan DTA Danau Rawapening | Rehabilitasi di DTA Danau melalui Agroforestry | Teratasinya masalah erosi dan sedimentasi melalui Agroforstry | Penanaman dengan pola agroforestry seluas 250 ha | KLHK, BPDASHL Pemali Jratun | Dinas LHK Prov. Jateng, Dinas LH Kab. Semarang, Kelompok Masyarakat |
| | | 1.3 | Penanganan Erosi dan Sedimentasi | Pembuatan bangunan KTA berupa Dam Penahan dan Gully Plug | Teratasinya masalah erosi dan sedimentasi | Berkurangnya erosi di DTA menjadi dibawah 1.800 ha, Terbangunnya 15 dam penahan, 50 unit gully plug | KLHK, PUPR, BPDASHL, BBWS Pemali Juana | Dinas LHK Prov. Jateng, Dinas PUPR Prov, Dinas LH Kab. Semarang, Kota Salatiga, Kelompok Masyarakat |
| Strategi 2. Program Penyelamatan DAS dan DTA Danau | | | | | | | | |
| 3. | Pencemaran dari limbah pertanian, rumah tangga, dan industri | 2.1 | Pengendalian sumber pencemaran | Pembangunan IPAL dan Saluran Kolam Pengolah Air Limbah (SAKPAL) | Terkendalinya pencemaran dari air limbah | Pembangunan IPAL dan SAKPAL di 5 desa | PUPR, KLHK, Pemda Kab | DLH Kab, Dinas PUPR Kab, kelompok masyarakat |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|--|---|---------|------------------|---|--|--|---|---|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | Penanganan sampah terpadu kawasan danau | Terkendalinya sampah di kawasan danau | Terkelolanya sampah pada desa-desa di sekitar kawasan danau | Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov., DLH Prov/Kab | Kelompok Masyarakat |
| | | | | Penanganan limbah B3 kawasan danau | Terkendalinya limbah B3 di kawasan danau | Instalasi pengolahan limbah B3 pada kampung iklim | DLH Prov/Kab, | Kementerian PUPR, KLHK, Dinas PUBMCK Prov. Jateng |
| | | | | Pengembangan biogas dan pupuk organik | Termanfaatkannya eceng gondok dan limbah pertanian dengan baik | Instalasi pengolahan limbah pertanian untuk biogas dan pupuk organik di 5 desa | DLH Prov/Kab, Dinas Pertanian Prov. | KLHK, Kementan, Kemendes PDT, Kelompok Masyarakat |
| | | 2.2 | Pengembangan SRI | Budidaya padi ramah lingkungan (SRI) | Terwujudnya peningkatan kapasitas petani pemakai air kawasan Rawapening dalam budidaya padi ramah lingkungan | Petani di kawasan danau menerapkan budidaya padi ramah lingkungan | Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. Jateng | Kementan |
| 4. | Berkembangnya eceng gondok di sungai yang bermuara ke danau | | | Pengendalian eceng gondok secara komprehensif | Terkendalinya gulma eceng gondok secara komprehensif | Penurunan penutupan eceng gondok dari 70% menjadi 20% | Pemda Kab. Semarang | PUPR |
| Strategi 3. Program Peningkatan Peran dan Partisipasi Masyarakat | | | | | | | | |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--|---------|--|---|--|---|---|--|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| 5. | Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penyelamatan ekosistem danau | 3.1 | Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat | Pelatihan SDM pariwisata dan konservasi | Terwujudnya SDM berkualitas bidang pariwisata dan konservasi | SDM ekowisata tersertifikasi | Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Prov. Jateng | Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab. Semarang, Dinas Kehutanan Prov |
| | | | | Pembinaan dan Pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat | Terwujudnya kemampuan wirausaha masyarakat | Jumlah masyarakat yang dibina dan dilatih wirausaha | Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Prov. Jateng | Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab. Semarang, Dinas UKM Prov/Kab |
| | | | | Bimbingan Teknis pengelolaan BUMDes | Terbentuknya BUMDes di sekitar kawasan danau | BUMDes di 2 kecamatan | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov. Jateng | Kementerian Desa dan PDT, Pemerintah Desa |
| | | | | Pelaksanaan kegiatan Bersih Sungai | Terwujudnya sungai yang bersih | Sungai yang mengalir ke danau meningkat kualitas airnya | Komunitas Peduli Sungai, DLHK Prov. Jateng | DLH Kab. Semarang |

7. DANAU BATUR

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|----------------------------|--------------|---------|----------|------------------|----------------------------|------------------|-----------|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| Strategi 1. Penataan Ruang | | | | | | | |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|--|--|---------|--|---|---|---|--|---|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| 1. | Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup | 1.1. | Penataan Ruang | Revisi RTRW Kabupaten Bangli | Pemanfaatan ruang sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung LH | Direvisinya RTRW Kab Bangli | DLH Kab Bangli | Bappeda Kab Bangli, P3E Bali Nusra |
| | | | | Penyusunan RDTR Kawasan Strategis Danau Batur | Pemanfaatan ruang sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung LH | Tersusunnya RDTR Kawasan Strategis Danau Batur | Dinas PUPR Kab Bangli | Bappeda Prov Bali, Bappeda Kab Bangli |
| | | | | Penetapan zonasi pemanfaatan perairan danau | Zonasi dan penerapannya sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung LH | Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Zonasi pemanfaatan perairan danau dan terlaksananya peraturan tersebut | Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kab Bangli | Bappeda Prov Bali, Bappeda Kab Bangli, DLH Kab Bangli, P3E Bali Nusra |
| Strategi 2. Penyelamatan Ekosistem Perairan Danau | | | | | | | | |
| 2. | Menurunnya kualitas air danau | a. | Pengelolaan kualitas air danau | Penetapan Kelas Air Danau | Pemanfaatan air danau sesuai dengan peruntukannya | Ditetapkan dan diimplementasi-kannya Pergub tentang Kelas Air Danau Batur | DLH Kab Bangli | DLH Prov Bali, P3E Bali Nusra, BPDAS |
| | | 2.2. | Pengendalian Pencemaran air dari perikanan budidaya dengan KJA | Pengembangan percontohan perikanan budidaya ramah lingkungan dengan Bioflok | Terbangunnya percontohan perikanan budidaya ramah lingkungan dengan Bioflok | Tersedianya 2 paket sarana prasarana dan terlaksananya pelatihan penerapannya | KKP | BPDAS, BPSKL, P3E, DLH Provinsi, swasta |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|--|---|---|---|--|--|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | 2.3. | Pengendalian pencemaran air dari pertanian | Pembangunan percontohan pertanian organik terpadu | Berkurangnya pencemaran bahan kimia ke perairan danau | Terwujudnya pertanian organik seluas 17 ha | Kementerian Pertanian | Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kab Bangli, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Prov Bali, P3E Bali Nusra |
| | | | | Pelaksanaan sekolah lapang pertanian ramah lingkungan | Berkurangnya pencemaran bahan kimia ke perairan danau | Terlaksananya sekolah lapang 50 kelompok masyarakat | Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kab Bangli | Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Prov Bali, P3E Bali Nusra |
| | | 2.4. | Pengendalian pencemaran air dari transportasi perairan | Penyediaan percontohan sarana prasarana transportasi ramah lingkungan | Berkurangnya pencemaran BBM/oli ke perairan danau | Tersedianya 1 unit percontohan kapal motor ramah lingkungan | Kementerian Perhubungan | Dinas Perhubungan, DLH dan Dinas Pariwisata Kab Bangli |
| | | 2.5. | Pemulihan kualitas air | Penyediaan sarana prasarana pemulihan kualitas air | Terpulihkannya kualitas air danau | Tersedianya 10 paket peralatan nano buble | Ditjen PPKL KLHK, DLH Kab Bangli | DLH Prov Bali, P3E Bali Nusra |
| | | | | Pembangunan kolam dan media purifikasi | Terpulihkannya kualitas air danau | Terbangunnya kolam dan media purifikasi | BPDASHL | Dinas LH Kab Bangli |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|----|---------------------------------|---------|---|--|--|---|--|--|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| 3. | Banyaknya eceng gondok di danau | 2.6. | Pengendalian dan pemanfaatan eceng gondok | Penyediaan sarana prasarana pemanfaatan eceng gondok | Berkurangnya limbah organik dan sebaran eceng gondok | Tersedianya sarana prasarana 2 unit gerobak motor, 2 unit perahu dan pengait, 2 unit pencacah, 3 unit pembuat pupuk padat dan 3 unit pembuat pupuk cair | BPDASHL | DLH Kab Bangli |
| | | | | Pembangunan pengolahan eceng gondok menjadi biogas | Berkurangnya limbah organik dan sebaran eceng gondok | Terbangunnya 50 unit biogas | DLH, Dinas ESDM dan Dinas Pertanian Kab Bangli | KLHK, Kementerian PUPR |
| | | | | Pelibatan masyarakat dalam pembersihan eceng gondok | Berkurangnya sebaran eceng gondok | Terlaksananya pembersihan eceng gondok 2 kali dalam setahun | DLH Kab Bangli | DLH Prov Bali, P3E, DPU, Kab bangli, DPU Prov Bali |
| 4. | Sedimentasi danau | 2.8. | Pengendalian sedimentasi | Pengerukan sedimen danau | Meningkatnya volume tampung perairan danau | Terlaksananya pengerukan 180.000 m3 sedimen | BWS Bali Penida | Dinas PU Prov Bali, Dinas PU Kab Bangli |
| | | | | Pemanfaatan sedimen | Meningkatnya volume tampung perairan danau | Termanfaatkan -nya sedimen | Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kab Bangli | Dinas Pertanian Prov Bali |
| | | | | Pembangunan tanggul | Menurunnya sedimen yang masuk ke danau | Pembangunan tanggul sepanjang 4.350 meter | BWS Bali Penida | Dinas PU Provinsi Bali, BKSDA, Pemerintah Kab |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|--|---|---------|-----------------------------------|--|--|---|--|---|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| 5. | Penurunan keanekaragaman hayati | 2.9. | Pelestarian keanekaragaman hayati | Penebaran bibit (restocking) ikan | Meningkatnya keanekaragaman dan populasi ikan di perairan danau | Tersebarinya 2.145.000 bibit ikan | Dinas KKP Kab Bangli | |
| 6. | Pemanfaatan air yang belum tertata | 2.10. | Penataan pemanfaatan air | Pengadaan sistem distribusi air terpadu | Terkelolanya pemanfaatan sumber daya air danau | Terbangunnya 4 unit sistem distribusi air terpadu | BWS Bali Penida | Dinas PU Kab Bangli, Dinas PU Prov Bali, Dinas LH Kab Bangli |
| | | | | Pengendalian penggunaan pompa air | Pengambilan air yang tertata dan ramah lingkungan | Terlaksananya penataan, pembinaan masyarakat dan pemantauan pompa air 2 kali pembinaan dan pemantauan per tahun | DLH Kab Bangli | DLH Prov Bali |
| Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Sempadan Danau | | | | | | | | |
| 7. | Pemanfaatan lahan sempadan danau yang tidak tertata, dan berdampak mencemari/ merusak danau | 3.1. | Penataan kawasan sempadan | Penentuan dan penetapan batas sempadan | Pemanfaatan sempadan memperhatikan batas dan fungsinya sebagai kawasan lindung | Tersedianya dasar peraturan dan acuan batas dan pemanfaatan sempadan | BWS Bali Penida, Dinas PUPR Kab Bangli | Dinas PU Prov Bali, P3E Bali Nusra, BPDASHL, BKSDA, BPN, Camat, Lurah |
| | | 3.2. | Pembangunan sarpras di sempadan | Pembangunan dermaga dengan fasilitas pemuangan limbah yang memadai | Berkurangnya abrasi danau | Terbangunnya 1 dermaga | Dinas Perhubungan | Kementerian Perhubungan |

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | | |
|---|--|---------|---|---|--|---|-------------------------------------|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| Strategi 4. Penyelamatan Daerah Tangkapan Air | | | | | | | | |
| 8. | Degradasi fungsi DAS | 4.1. | Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Penyediaan sarpras konservasi tanah dan air | Penurunan laju erosi | Tersedianya 50 unit gully pug, 150 ha guludan, drop strucker, saluran deversi, dan 20 unit trap sedimen | BPDAS HL | DLH Kab Bangli, Dinas PUPR, Kab Bangli, P3E |
| | | | | Reboisasi dan penghijauan | Penurunan laju erosi dan luas lahan kritis | Penanaman seluas 315 ha | BPDAS HL, Dinas Kehutanan Prov Bali | DLH Kab Bangli, P3E |
| | | | | Pembangunan terasering | Penurunan laju erosi | Dibuatnya 5 ha terasering | Dinas PUPR Kab Bangli | DLH Kab Bangli |
| | | | | Pembangunan bronjong di alur sungai | Penurunan laju erosi dan sedimentasi | Dibangunnya 4 km bronjong | Dinas PUPR Kab Bangli | DLH Kab Bangli |
| | | 4.2. | Pembangunan infrastruktur pengendali erosi/sedimen dan drainase | Pembangunan bendung penahan sedimen | Penurunan laju erosi, sedimentasi dan dampak banjir di sekitar danau | Terbangunnya 2 bendung | Kementerian PUPR | KLH, Ristek dan Dikti |
| | | | | Pembangunan drainase | Berkurangnya kejadian banjir | Terbangunnya drainase di kawasan permukiman | Kementerian PUPR | Dinas PUPR Cipta Karya |
| 9. | Kerusakan lahan DTA akibat pertambangan Galian C | 4.3. | Pengendalian kerusakan lahan akibat pertambangan Galian C | Penyusunan Pergub tentang Moratorium Pertambangan Galian C di DTA Danau | Peningkatan kualitas sumberdaya lahan di DTA | Tersusun dan tersosialisasikan-nya Pergub | Dinas PU Provinsi Bali | Kementerian ESDM, DLH Prov Bali DLH Kab Bangli, Satpol PP Kab Bangli, Geopark |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|--|--|---------|-------------------------------|--|---|--|----------------------------------|--|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| 10 | Perambahan hutan di DTA | 4.4. | Pengendalian perambahan hutan | Pembinaan dan patroli keamanan pencegahan perambahan hutan | Penurunan perambahan 10% eksisten per tahun | Terlaksananya pembinaan dan patrol rutin 2 kali dalam setahun | BKSDA, Dinas Kehutanan Prov Bali | |
| 11 | Sampah yang belum terkelola dengan baik | 4.5. | Pengelolaan sampah | Penyediaan prasarana pengelolaan sampah di permukiman | Berkurangnya sampah yang masuk ke danau | Terbangunnya 1 unit TPS 3R, 12 unit bank sampah (1 unit/desa) dan 2 unit truk sampah | KLHK, Kem PUPR, DLH Kab Bangli | DLH Prov Bali, P3E, DPU Kab Bangli, DPU Prov Bali |
| | | | | Penyediaan prasarana pengelolaan sampah di TWA | Berkurangnya sampah yang masuk ke danau | Terbangunnya 1 unit TPS 3R di TWA | BKSDA | DLH Kab Bangli, DLH Prov Bali, P3E |
| | | | | Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah | Meningkatnya kepedulian dan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah (1 kelompok/desa) | Terbentuk dan terbinanya 5 kelompok masyarakat | DLH Kab Bangli | DLH Prov Bali, P3E, DPU Kab Bangli, DPU Prov Bali, BPSKL |
| Strategi 5. Pemantauan, Evaluasi dan Pengembangan Basis Data dan Sistem Informasi | | | | | | | | |
| 12 | Perlu ditingkatkannya pemantauan, evaluasi serta basis data dan sistem informasi | 5.1. | Pemantauan air danau | Pembangunan fasilitas pemantauan tinggi muka air danau | Tersedianya data bagi pengelolaan danau | Terbangunnya 4 pos pemantauan tinggi muka air danau | BWS Bali Penida | Dinas PU Prov Bali, Dinas PU Kab Bangli |
| | | | | Penyediaan alat pemantauan kedalaman danau | Tersedianya data bagi pengelolaan danau | Tersedianya 2 unit alat pemantauan kedalaman danau | BPDAS | DLH Kab Bangli |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|---|--|---------|------------------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | Penyediaan alat pemantauan kualitas air danau | Tersedianya data bagi pengelolaan danau | Tersedianya 1 unit alat pemantauan kualitas air danau | BPDAS | DLH Kab Bangli |
| | | | | Pelaksanaan pemantauan kualitas air danau | Tersedianya data bagi pengelolaan danau | Tersedianya data kualitas air danau | DLH Kab Bangli | DLH Prov Bali, P3E Bali Nusra, BPDASHL, BWS Bali Penida |
| | | 5.2. | Pengembangan sistem informasi | Pembuatan data base dan sistem informasi danau | Tersedianya data dan informasi bagi pengelolaan danau | Tersedianya sistem informasi danau | Dinas PUPR Kab Bangli, BPDAS, | |
| Strategi 6. Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Peran Para Pihak | | | | | | | | |
| 13 | Perlu dikembangkannya kelembagaan dan ditingkatkannya peran para | 6.1. | Pengembangan kapasitas kelembagaan | Penguatan forum peduli danau | Meningkatnya koordinasi dan kepedulian para pihak dalam pengelolaan danau | Terselenggaranya pembinaan 1 kali dalam setahun | BPSKL | DLH Kab Bangli, DLH Prov Bali, BPDASHL, BWS Bali Penida |
| | | | | Pembentukan kelembagaan masyarakat dalam budidaya perikanan darat | Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam budidaya perikanan darat | Terbentuk dan terbinanya 5 kelompok masyarakat | Dinas PKP Kab Bangli | |

8. DANAU SENTARUM

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | | |
|---|--|---------|---|---|--|---|------------------|---------------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| Strategi 1. Penataan Kawasan dan Koordinasi Pengelolaan Danau | | | | | | | | |
| 1. | Perlu ditingkatkannya penataan kawasan | 1.1. | Penataan Kawasan | Penataan batas administratif desa | Terwujudnya batas administratif desa | Terlaksananya penataan batas administratif 27 desa di kawasan Danau Sentarum | Dinas PMD | Bappeda, Tapem, FIP-1, FORCLIME |
| 2. | Belum tertata dan terkoordinasinya pengelolaan danau | 1.2. | Koordinasi Pengelolaan Danau | Penyusunan Perda tentang Perlindungan, Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem Danau | Terwujudnya pengelolaan danau yang tertata dan terkoordinasi | Tersusun, ditetapkan, tersosialisasi dan diimplementasikannya Perda Pengelolaan Danau | Dinas LH | Setda Bagian Hukum |
| | | | | Monev terpadu para pemangku kepentingan | Terwujudnya pengelolaan danau yang tertata dan terkoordinasi | Terlaksananya monev terpadu minimal 2 kali dalam setahun | Bappeda | OPD dan Mitra |
| Strategi 2. Penyelamatan Ekosistem Perairan Danau | | | | | | | | |
| 3. | Penurunan kualitas air dan eutrofikasi | a. | Pengelolaan kualitas air | Pemantauan kualitas air | Meningkatnya kualitas air | Terlaksananya pemantauan kualitas air 2 kali setiap tahun | Dinas LH dan PPR | LIPI |
| | | 2.2. | Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dari kegiatan usaha perkebunan | Inventarisasi dan pemantauan sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan khususnya dari kegiatan perkebunan kelapa sawit | Meningkatnya kualitas air | Terlaksananya inventarisasi dan pemantauan sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan dari kegiatan perkebunan kelapa sawit 2 kali setiap tahun | Dinas LH dan PPR | LIPI |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--|---------|---|--|------------------------------------|--|------------------|----------------------|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| 4. | Penurunan populasi ikan endemik | 2.3. | Pelestarian ikan endemik | Pengembangan suaka perikanan (reservat) | Meningkatnya populasi ikan endemik | Terwujudnya 9 suaka perikanan | Dinas Perikanan | Dinas LH dan Bappeda |
| | | | | Pelaksanaan kajian ilmiah potensi sumberdaya ikan | Meningkatnya populasi ikan endemik | Terlaksananya 5 kajian ilmiah potensi sumberdaya ikan | Dinas Perikanan | Dinas LH dan Bappeda |
| | | | | Restocking ikan endemik | Meningkatnya populasi ikan endemik | Terlaksananya restocking 120.000 bibit ikan endemik | Dinas Perikanan | Dinas LH dan Bappeda |
| | | | | Rehabilitasi habitat perikanan/reservat | Meningkatnya populasi ikan endemik | Terlaksananya rehabilitasi 8 habitat perikanan/reservat | Dinas Perikanan | Dinas LH dan Bappeda |
| 5. | Penurunan produksi perikanan secara umum | 2.4. | Pengembangan perikanan tangkap ramah lingkungan | Penyusunan Perda Perikanan Berkelanjutan | Perikanan berkelanjutan | Tersusun, ditetapkan, tersosialisasi dan diimplementasikan Perda Perikanan Berkelanjutan | Dinas Perikanan | Setda Bagian Hukum |
| | | | | Pengelolaan perikanan tangkap berbasis budaya (<i>culture based fishery</i>) | Perikanan tangkap ramah lingkungan | Dikembangkannya CBF pada 9 lokasi perikanan tangkap | Dinas Perikanan | Dinas LH dan Bappeda |
| | | | | Kampanye perikanan tangkap ramah lingkungan | Perikanan tangkap ramah lingkungan | Terlaksananya 6 kali kampanye perikanan tangkap ramah lingkungan | Dinas Perikanan | Dinas LH dan Bappeda |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|---|--|---------|--|--|---|--|------------------|----------------------|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | Pemantauan dan evaluasi serta patroli perikanan tangkap ramah lingkungan | Perikanan tangkap ramah lingkungan | Terlaksananya pemantauan dan evaluasi perikanan tangkap serta diperolehnya data dan informasi insiden setiap tahun, dengan jumlah hari patroli 25 hari per tahun | Dinas Perikanan | Dinas LH dan Bappeda |
| 6. | Rendahnya produktifitas perikanan budidaya | 2.5. | Pengembangan perikanan budidaya ramah lingkungan | Pengembangan dan pengelolaan kawasan perikanan budidaya air tawar | Perikanan budidaya ramah lingkungan | Terwujudnya pengelolaan perikanan budidaya air tawar secara ramah lingkungan di 1 kawasan | Dinas Perikanan | Dinas LH dan Bappeda |
| Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Sempadan dan Daerah Tangkapan Air | | | | | | | | |
| 7. | Lahan kritis, erosi dan sedimentasi di DTA danau | 3.1. | Rehabilitasi hutan dan lahan | Pelaksanaan Impact Assessment RHL | Efektifitas RHL | Tersedianya data kepekaan erosi dan laju sedimentasi | BPDASHL | KPH, BBTNBKDS |
| | | | | Rehabilitasi lahan gambut | Menurunnya kerusakan lahan gambut di DTA danau | Meningkatnya tutupan vegetasi seluas 1000 ha | BPDASHL | KPH, BBTNBKDS |
| 8. | Kerusakan dan kebakaran hutan dan lahan | 3.2. | Pengendalian kebakaran hutan dan lahan | Patroli perlindungan, pengamanan dan pencegahan kebakaran hutan | Menurunnya 20% hotspot dan 10% luas kebakaran di 6 resort TNDS dan lokasi rawan kebakaran | Terlaksananya patroli kebakaran hutan dan lahan di 6 resort | BBTNBKDS | KPH, BPBD |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|----|---|---------|---|--|---|--|------------------|---------------|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | Pembentukan dan pembinaan MPA (Masyarakat Peduli Api) dalam pengendalian kebakaran hutan | Terkendalnya kerusakan dan kebakaran hutan dan lahan | Terbentuknya 5 kelompok MPA dan terlaksananya 30 kegiatan pembinaan (6 kegiatan pembinaan per tahun) | BBTNBKDS | KPH, BPBD |
| 9. | Penebangan dan perburuan liar | 3.3. | Pengendalian penebangan dan perburuan liar | Patroli perlindungan, pengamanan | Terkendalnya penebangan dan perburuan liar | Terlaksananya 72 patroli penebangan liar di 6 resort selama 5 tahun untuk penebangan dan perburuan liar | BBTNBKDS | KPH, BPBD |
| 10 | Kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat kegiatan pertanian/ perkebunan yang tidak ramah lingkungan | 3.4. | Pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan dari kegiatan perkebunan | Penilaian pengelolaan lingkungan bagi usaha perkebunan | Menurunnya kerusakan dan pencemaran lingkungan dari kegiatan usaha perkebunan | Terlaksananya penilaian pengelolaan lingkungan terhadap 20 usaha perkebunan (minimal 4 usaha perkebunan per tahun) | Dinas Pertanian | Bappeda |
| | | | | Penyediaan pupuk alami/kompos | Menurunnya kerusakan dan pencemaran lingkungan dari kegiatan usaha perkebunan | Tersedianya pupuk alami/kompos di 10 desa di sekitar danau | BBTNBKDS | Distan |
| | | | | Kampanye kegiatan pertanian ramah lingkungan | Menurunnya kerusakan dan pencemaran lingkungan dari kegiatan pertanian | Terlaksananya kampanye di 5 desa di sekitar danau | WWF | KPH, BBTNBKDS |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|--|---|---------|--|---|---|---|-------------------|---------------------------|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| 11 | Perlu ditingkatkannya pengelolaan sampah | 3.5. | Pengelolaan sampah | Pembangunan TPS 3 R | Terkelolanya sampah di danau dan sekitarnya | Terbangunnya 2 unit TPS 3R | KLHK | Dinas LH, PR dan KP |
| | | | | Pembangunan Wasades (Wadah Sampah Desa) | Terkelolanya sampah di danau dan sekitarnya | Terbangunnya 17 Wasades | KLHK | Dinas LH, PR dan KP |
| 12 | Rendahnya sanitasi di sekitar danau | 3.6. | Peningkatan sanitasi | Sosialisasi sanitasi dan lingkungan sehat | Meningkatnya sanitasi di sekitar danau | Terlaksananya 5 kali sosialisasi sanitasi per tahun | Dinas Cipta Karya | Dinas Kesehatan, Pem Desa |
| | | | | Pembangunan jamban keluarga | Meningkatnya sanitasi di sekitar danau | Tersedianya jamban keluarga di 5 desa | Dinas Cipta Karya | Dinas Kesehatan, Pem Desa |
| Strategi 4. Peningkatan Kelembagaan, Kapasitas dan Peran Serta Para Pihak | | | | | | | | |
| 13 | Perlu ditingkatkannya peran para pihak | 4.1. | Peningkatan peran para pihak | Koordinasi dan fasilitasi Forum Danau setempat | Meningkatnya peran para pihak | Terlaksananya 60 paket kegiatan forum | BPDASHL | DLHK Banten |
| 14 | Perlu ditingkatkannya kapasitas dan peran serta masyarakat di sekitar danau | 4.2. | Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat | Pengadaan PLTS untuk masyarakat perdesaan | Meningkatnya kapasitas masyarakat | Tersedianya listrik dan penerangan di 9 desa | DPMD | |
| | | | | Pengembangan agroforestri, budidaya lebah madu dan HHBK | Meningkatnya kapasitas masyarakat | Terlaksananya pengembangan agroforestri, budidaya lebah madu dan HHBK di 9 desa | FORCLIME | KPH, Distan |
| | | | | Pengembangan peternakan dengan bibit unggul | Meningkatnya kapasitas masyarakat | Terlaksananya pengembangan peternakan melalui penyediaan 25 bibit unggul ternak | Dinas Pertanian | BAPPEDA |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|--|--|--|--|------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | Pembinaan dan penyediaan sarpras pengolahan dan pemasaran produk perikanan | Meningkatnya kapasitas masyarakat | Terlaksananya 20 kegiatan pembinaan, serta pemberian sarpras 12 KUB untuk pengolahan dan pemasaran produk perikanan oleh kelompok masyarakat | Dinas Perikanan | |
| | | | | Pembentukan dan pengembangan kelompok masyarakat pengolah produk perikanan | Meningkatnya kapasitas masyarakat | Pembentukan 18 kelompok baru/pemula, 12 kelompok mikro, dan 12 kelompok kelas usaha | Dinas Perikanan | Dinas Perdagangan dan Koperasi |
| | | | | Pembinaan perikanan budidaya | Meningkatnya kapasitas masyarakat | Terlaksananya pembinaan perikanan budidaya bagi 12 kelompok masyarakat | Dinas Perikanan | Bappeda |
| | | | | Pengembangan kelembagaan masyarakat perikanan budidaya | Meningkatnya kapasitas masyarakat | Terfasilitasinya pembentukan badan hukum 72 kelompok masyarakat budidaya perikanan (Pokdakan) | Dinas Perikanan | |
| | | | | Penyaluran bantuan sarpras perikanan budidaya | Meningkatnya kapasitas masyarakat | Tersalurkannya 100% bantuan | Dinas Perikanan | Bappeda |
| | | | | Perlindungan nelayan dengan fasilitas asuransi | Terwujudnya perlindungan hak-hak nelayan kecil | 2500 nelayan mendapatkan fasilitas | KKP | Dinas Pertanian |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|--|---------------------------------------|---------|--|---|---|--|---------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | | | asuransi perikanan | | |
| | | | | Bantuan pembangunan rumah nelayan | Terwujudnya bantuan bagi nelayan kecil | Terwujudnya bantuan pembangunan 500 unit rumah khusus bagi nelayan | Dinas LH, Dinas PR dan Dinas KP | |
| | | | | Pembentukan BUMDES | Terwujudnya lembaga ekonomi berbasis desa | Terbentuknya BUMDES di 10 desa | Dinas PMD | Bappeda |
| Strategi 5. Peningkatan Potensi Kawasan | | | | | | | | |
| 15 | Perlu ditingkatkannya potensi kawasan | 5.1. | Pembangunan infrastruktur dasar dan penyediaan fasilitas kawasan | Pembangunan jalan desa sebagai infrastruktur dasar pengembangan kawasan | Terbangunnya infrastruktur dasar kawasan | Terlaksananya pembangunan 19 unit jalan desa | Dinas CKPR | DPMPD |
| | | | | Pembangunan jaringan air bersih | Terbangunnya infrastruktur dasar kawasan | Terlaksananya pembangunan 1 unit jaringan air bersih desa | FORCLIME FC | Dinas CKPR |
| | | | | Pembangunan dermaga penunjang pariwisata danau | Terbangunnya infrastruktur dasar kawasan | Terlaksananya pembangunan 1 unit dermaga | Kem Pariwisata | Disporapar |
| | | | | Pembangunan pondok wisata dan pusat informasi wisata | Terbangunnya fasilitas kawasan | Terlaksananya pembangunan 3 pondok wisata dan 1 pusat informasi wisata | Kem Pariwisata | Disporapar |
| | | | | Penyusunan peta wisata Danau Sentarum dan sekitarnya | Tersedianya informasi kawasan | Tersusunnya peta wisata Danau Sentarum dan sekitarnya | Disporapar | BBTNBKDS, Kemendesa PDTT, Kemenpar |

9. DANAU KASKADE MAHAKAM (SEMAYANG-MELINTANG-JEUMPANG)

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | | |
|---|--|---------|--------------------------------------|--|---|--|---------------------------------|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| Strategi 1. Penataan Ruang dan Koordinasi Pengelolaan | | | | | | | | |
| 1. | Belum tersedianya rencana tata ruang Kawasan Danau | 1.1. | Penataan Ruang | Penyusunan RDTR Kawasan Danau Kaskade Mahakam | Pemanfaatan ruang sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung LH | Tersusun,, ditetapkan dan diimplementasi-kannya RDTR Kawasan Danau dan Sempadan | Bappeda dan Dinas PUTRPR Kaltim | Dinas LH Kaltim, Dinas PUTRPR Kaltim, Bappeda, Dinas LH dan Dinas PU Pemda Kukar, Kubar, Kutim, Mahulu, BWS, BPDASHL, masyarakat dan dunia usaha |
| | | | | Penyusunan Zonasi Danau Kaskade Mahakam | Pemanfaatan ruang sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung LH | Tersusun, ditetapkan dan diimplementasi-kannya Zonasi Danau Tondano | Bappeda dan Dinas PUTRPR Kaltim | Dinas LH Kaltim, Dinas PUTRPR Kaltim, Bappeda, Dinas LH dan Dinas PU Pemda Kukar, Kubar, Kutim, Mahulu, BWS, BPDASHL, masyarakat dan dunia usaha |
| 2. | Belum tertata dan terkoordinasinya Pengelolaan Danau Kaskade Mahakam | 1.2. | Koordinasi Pengelolaan Kawasan Danau | Penyusunan, Penetapan dan Implementasi Perda Provinsi Kaltim tentang Pengelolaan Danau Kaskade Mahakam | Tersedianya arahan Pengelolaan Danau Kaskade Mahakam secara tertata dan terkoordinasi | Tersusun, ditetapkan, dan diimplementasikannya Perda Prov Kaltim tentang Pengelolaan Danau Kaskade Mahakam | Bappeda Kaltim | Dinas LH Kaltim, Dinas PUTRPR Kaltim, Bappeda, Dinas LH dan Dinas PU Pemda Kukar, Kubar, Kutim, Mahulu, BWS, BPDASHL, masyarakat dan dunia usaha |
| | | | | Peningkatan koordinasi pemangku kepentingan | Terlaksananya Pengelolaan Danau Kaskade Mahakam secara tertata dan terkoordinasi | Terlaksananya pertemuan koordinasi 3 kali per tahun | Bappeda Kaltim | Dinas LH Kaltim, Dinas PUTRPR Kaltim, Bappeda, Dinas LH dan Dinas PU Pemda Kukar, Kubar, Kutim, Mahulu, BWS, BPDASHL, |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|---|-------------------------------|---------|--------------------------|--|--|---|---------------------------------------|---|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | | | | | masyarakat dan dunia usaha |
| | | | | Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan Danau Kaskade Mahakam | Terlaksananya Pengelolaan Danau Kaskade Mahakam secara tertata dan terkoordinasi | Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan pengelolaan Danau Kaskade Mahakam untuk 250 orang (50 orang per tahun) dan 100 peserta pelatihan (20 orang per tahun) | Bappeda Kaltim | Dinas LH Kaltim, Dinas PUTRPR Kaltim, Bappeda, Dinas LH dan Dinas PU Pemda Kukar, Kubar, Kutim, Mahulu, BWS, BPDASHL, masyarakat dan dunia usaha |
| Strategi 2. Penyelamatan Ekosistem Perairan Danau | | | | | | | | |
| 2. | Menurunnya kualitas air danau | a. | Pengelolaan kualitas air | Penetapan Status Mutu Air, Penyusunan Rencana Pemulihan dan Implementasinya | Meningkatnya kualitas air danau | Terlaksananya penetapan status mutu air, penyusunan rencana pemulihan dan implementasinya | DLH, Dinas PU Kaltim, BWS, BPDASHL | Bappeda, Dinas Pertanian dan TP, Dinas ESDM, dan Disbun Kaltim. Bappedam Dinas LH dan Dinas PU Kukar, Kubar, Kutim dan Mahulu. Masyarakat dan dunia usaha |
| | | | | Inventarisasi sumber pencemar, penyuluhan dan pendampingan pengurangan beban pencemaran, serta monitoring TMA dan kualitas air | Meningkatnya kualitas air danau | Tersedianya data lokasi dan jenis sumber pencemar, serta terlaksananya penyuluhan dan pendampingan pada 5 Pos TMA dan 12 stasiun pemantau kualitas air | DLH, Dinas PU Kaltim, BWS dan BPDASHL | Bappeda, Dinas Pertanian dan TP, Dinas ESDM, dan Disbun Kaltim. Bappedam Dinas LH dan Dinas PU Kukar, Kubar, Kutim dan Mahulu. Masyarakat dan dunia usaha |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|--|---|---------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | Pemantauan kualitas air secara online | Meningkatnya kualitas air danau | Terbangunnya 15 stasiun pemantau kualitas air secara online/real time (sudah ada 4 stasiun) | DLH, Dinas PU Kaltim, BWS dan BPDASHL | Bappeda, Dinas Pertanian dan TP, Dinas ESDM, dan Disbun Kaltim. Bappedam Dinas LH dan Dinas PU Kukar, Kubar, Kutim dan Mahulu. Masyarakat dan dunia usaha |
| | | | | Pengembangan sistem pengelolaan kualitas air | Meningkatnya kualitas air danau | Tersusun dan terimplementasikan SOP pengelolaan kualitas air bagi 3 danau (Semayang, Melintang, Jeumpang) | DLH, Dinas PU Kaltim, BWS dan BPDASHL | Bappeda, Dinas Pertanian dan TP, Dinas ESDM, dan Disbun Kaltim. Bappedam Dinas LH dan Dinas PU Kukar, Kubar, Kutim dan Mahulu. Masyarakat dan dunia usaha |
| | | 2.2. | Pengendalian Pencemaran air dari limbah ikan | Pelatihan pengolahan limbah ikan menjadi pakan ikan | Meningkatnya kualitas air danau | Dilaksanakannya pelatihan bagi 100 orang peserta di tiap desa dan terbangunnya 5 rumah pelatihan | DLH, Dinas PU Kaltim, BWS dan BPDASHL | Bappeda, Dinas Pertanian dan TP, Dinas ESDM, dan Disbun Kaltim. Bappedam Dinas LH dan Dinas PU Kukar, Kubar, Kutim dan Mahulu. Masyarakat dan dunia usaha |
| | | 2.3. | Pengendalian pencemaran air dari limbah rumah tangga | Pembangunan IPAL komunal | Meningkatnya kualitas air danau | Terbangunnya 9 IPAL (1 IPAL di setiap desa) | DLH, Dinas PU Kaltim, BWS dan BPDASHL | Bappeda, Dinas Pertanian dan TP, Dinas ESDM, dan Disbun Kaltim. |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--|---------|---|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | | | | | Bappedam Dinas LH dan Dinas PU Kukar, Kubar, Kutim dan Mahulu. Masyarakat dan dunia usaha |
| | | 2.4. | Pengendalian pencemaran air dari limbah transportasi perairan dan bengkel | Pembangunan pengolahan limbah transportasi dan bengkel | Meningkatnya kualitas air danau | Terbangunnya 9 bengkel (1 bengkel di setiap desa) | DLH, Dinas PU Kaltim, BWS dan BPDASHL | Bappeda, Dinas Pertanian dan TP, Dinas ESDM, dan Disbun Kaltim. Bappedam Dinas LH dan Dinas PU Kukar, Kubar, Kutim dan Mahulu. Masyarakat dan dunia usaha |
| 3. | Banyaknya sampah di danau dan sekitarnya | 2.5. | Pengelolaan sampah | Penyediaan TPS dan TPA serta pembentukan Bank Sampah | Terkelolanya sampah di sekitar danau | Tersedianya 25 TPS dan 1 TPA serta terbentuknya 5 Bank Sampah di tiap desa (saat ini belum ada TPS, TPA dan Bank Sampah) | DLH dan Dinas PU Kaltim, BWS, BPDASHL | Bappeda, Dinas Pertanian dan TP, Dinas ESDM, dan Disbun Kaltim. Bappedam Dinas LH dan Dinas PU Kukar, Kubar, Kutim dan Mahulu. Masyarakat dan dunia usaha |
| | | | | Konversi sampah ke biogas | Terkelolanya sampah di sekitar danau | Tersedianya 9 biodigester (sudah ada 4 biodigester) | DLH dan Dinas PU Kaltim, BWS, BPDASHL | Bappeda, Dinas Pertanian dan TP, Dinas ESDM, dan Disbun Kaltim. Bappedam Dinas LH dan Dinas PU Kukar, Kubar, Kutim dan Mahulu. |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------------------------|---------|-------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | | | | | Masyarakat dan dunia usaha |
| | | | | Pelatihan 3R | Terkelolanya sampah di sekitar danau | Terrlaksananya pelatihan 3R bagi 250 orang peserta di tiap desa (belum pernah ada pelatihan) | DLH dan Dinas PU Kaltim, BWS, BPDASHL | Bappeda, Dinas Pertanian dan TP, Dinas ESDM, dan Disbun Kaltim. Bappedam Dinas LH dan Dinas PU Kukar, Kubar, Kutim dan Mahulu. Masyarakat dan dunia usaha |
| 4. | Banyaknya limbah kayu di danau | 2.6. | Pengelolaan limbah kayu | Pemanfaatan limbah kayu untuk diolah menjadi berikat dan arang | Menurunnya limbah kayu di danau | Terbangunnya 9 pusat pengolahan limbah kayu menjadi berikat dan arang (1 pusat untuk 1 desa) | DLH dan Dinas PU Kaltim, BWS, BPDASHL | Bappeda, Dinas Pertanian dan TP, Dinas ESDM, dan Disbun Kaltim. Bappedam Dinas LH dan Dinas PU Kukar, Kubar, Kutim dan Mahulu. Masyarakat dan dunia usaha |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|----|---------------------------------|---------|---|---|---|--|--|---|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| 5. | Banyaknya eceng gondok di danau | 2.7. | Pengendalian dan pemanfaatan gulma air (eceng gondok) | Penyepakatan dan implementasi pengendalian pencemaran unsur hara dari berbagai kegiatan | Terkendalnya pertumbuhan gulma air | Tersedianya data, tercapainya kesepakatan serta dilaksanakan dan dimonitornya implementasi kesepakatan untuk pengurangan 60% pencemaran unsur hara | DLH Kaltim, BWS, BPDASHL, DLH Kab Kukar, Kubar, Kutim dan Mahulu | Bappeda, Dishut, Distamben, DPK, Distan TP dan Dinas ESDM Kaltim. Masyarakat dan dunia usaha. |
| | | | | Pemanfaatan gulma air | Terkendalnya pertumbuhan gulma air dan pemanfaatan yang positif | Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan pemanfaatan gulma untuk pakan ternak, pakan ikan dan pupuk kompos di 7 desa | DLH Kaltim, BWS, BPDASHL, DLH Kab Kukar, Kubar, Kutim dan Mahulu | Bappeda, Dishut, Distamben, DPK, Distan TP dan Dinas ESDM Kaltim. Masyarakat dan dunia usaha. |
| | | | | Pembersihan gulma air yang mengganggu transportasi perairan | Terkendalnya dampak gulma air | Dilaksanakannya pembersihan gulma air di 9 desa | Dinas PUTRPR Kaltim, BWS, BPDASHL, DLH, Dinas PU dan Dishub Kab Kukar, Kubar, Kutim dan Mahulu | Bappeda, Dishut, Distamben, DPK, Distan TP dan Dinas ESDM Kaltim. Masyarakat dan dunia usaha. |

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | | |
|----|--|---------|-----------------------------------|---|---|---|--|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| 6. | Meingkatnya pendangkalan/ sedimentasi danau dan menyempitnya alur sungai | 2.8. | Pengendalian sedimentasi | Pengerukan sedimen pada muara sungai yang mengarah ke danau | Berkurangnya pendangkalan/ penyempitan danau dan sungai | Dilaksanakannya pengerukan sedimen <ul style="list-style-type: none"> - di Rebak Rinding (4000 m x 30 m x 2 m), - di Semayang (4000 m x 40 m x 2 m), - di Melintang (4000 m x 200 m x 2 m) - di Jeumpang (6000 m x 200 m x 2 m) - di Jantur (6000 m x 200 m x 2 m) | Dinas PU Kaltim, BWS, Dinas PU dan Dishub Kukar, Kubar, Kutim dan Mahulu | Bappeda, Dinas Pertanian dan TP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas ESDM dan Disbun Kaltim. Dinas LH dan Dinas PU Kab Kukar, Kubar, Kutim, Mahulu. Masyarakat dan dunia usaha. |
| | | | | Pemanfaatan sedimen untuk media pertanian | Berkurangnya pendangkalan/ penyempitan danau dan sungai | Pemanfaatan sedimen sebanyak 50 ton/bulan secara bertahap dalam waktu lima tahun | DLH, Dinas PUTRPR dan BPBD Kaltim. Pemkab Kukar, Kubar, Kutim dan Mahulu, BWS, BPDASHL | Bappeda, Dishut, Distamben, DPK, Distan TP, Disperindagkop, Dinas Pariwisata dan Dinas Sosial Kaltim. masyarakat dan dunia usaha. |
| 7. | Penurunan keanekaragaman hayati | 2.9. | Pelestarian keanekaragaman hayati | Rehabilitasi kolam reservat ikan | Pulihnya reservat ikan | Terpulihkannya kedalaman 50% reservat (saat ini seluruh reservat mengalami pendangkalan sehingga tidak mampu mendukung kehidupan dan pemijahan ikan) | Dinas Perikanan dan Kelautan dan Dinas PU Kaltim, BWS, Dinas Perikanan dan Dinas PU Kab Kukar, | Bappeda, Dinas Pertanian dan TP, Dinas ESDM, dan Disbun Kaltim. Bappedam Dinas LH dan Dinas PU Kukar, Kubar, Kutim dan Mahulu. |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|--|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | | | | Kukar, Kutim dan Mahulu | Masyarakat dan dunia usaha |
| | | | | Pengaturan penangkapan ikan dan pembinaan pengalihan usaha Pokmas ke budidaya ikan ramah lingkungan | Terwujudnya perikanan (budidaya maupun tangkap) yang ramah lingkungan | Berkurangnya illegal fishing sampai 80% dari kondisi sekarang (saat ini banyak ditemukan illegal fishing di seluruh lokasi danau) | Dinas Perikanan dan Kelautan dan Dinas PU Kaltim, BWS, Dinas Perikanan dan Dinas PU Kab Kukar, Kutim dan Mahulu | Bappeda, Dinas Pertanian dan TP, Dinas ESDM, dan Disbun Kaltim. Bappedam Dinas LH dan Dinas PU Kukar, Kubar, Kutim dan Mahulu. Masyarakat dan dunia usaha |
| | | | | Re-stocking ikan | Meningkatnya produktifitas perikanan | Peningkatan jenis dan kelimpahan ikan 45% dari kondisi sekarang | Dinas Perikanan dan Kelautan dan Dinas PU Kaltim, BWS, Dinas Perikanan dan Dinas PU Kab Kukar, Kutim dan Mahulu | Bappeda, Dinas Pertanian dan TP, Dinas ESDM, dan Disbun Kaltim. Bappedam Dinas LH dan Dinas PU Kukar, Kubar, Kutim dan Mahulu. Masyarakat dan dunia usaha |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|----|---|---------|----------------------------|---|---------------------------------------|--|---|---|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | Pengendalian budidaya ikan invasif (ikan Toman) | Perlindungan spesies asli/endemik | Berkurangnya keramba budidaya ikan toman sebanyak 80% dari yang ada saat ini | Dinas Perikanan dan Kelautan dan Dinas PU Kaltim, BWS, Dinas Perikanan dan Dinas PU Kab Kukar, Kutim dan Mahulu | Bappeda, Dinas Pertanian dan TP, Dinas ESDM, dan Disbun Kaltim. Bappedam Dinas LH dan Dinas PU Kukar, Kubar, Kutim dan Mahulu. Masyarakat dan dunia usaha |
| | | | | Penyuluhan konservasi fauna endemik | Konservasi spesies asli/endemik | Terlaksananya sosialisasi dan implementasi konservasi fauna endemik | BKSDA, DLH Kukar, Kubar, Kutim dan Mahulu | Dinas Kehutanan dan DLH Prov Kaltim, Forum Masyarakat Danau, Forum DAS, Yayasan Rasi, Yayasan Bidabiwase, Tim GNKPA, Lemilka dan dunia usaha |
| 8. | Berkurangnya vegetasi bagi habitat biota dan pengendali gelombang di perairan danau | 2.10 | Revegetasi daerah reservat | Penanaman pohon lokal | Terpulihkannya kawasan reservat danau | Revegetasi dengan 1 juta bibit pohon (200.000 bibit per tahun) | Dishut Kaltim, BPDASHL, DLH Kukar, Kubar, Kutim dan Mahulu | Bappeda, Dinas ESDM, Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim, BPBD, Dinas PU dan DLH Kukar, Kubar, Kutim dan Mahulu, masyarakat dan dunia usaha |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|----|------------------------------------|---------|--------------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|---|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | Revegetasi perlindungan gelombang | Pembuatan pulau dan penanaman di sekitar muara desa | Terbangunnya kawasan perlindungan dari gelombang air | Ditanamnya pohon hingga 70% kawasan permukiman di sekitar danau memiliki penahan gelombang air | Dishut Kaltim, BPDASHL, BWS | Bappeda, Dinas ESDM, Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim, BPBD, Dinas PU dan DLH Kukar, Kubar, Kutim dan Mahulu, masyarakat dan dunia usaha |
| 9. | Meningkatnya banjir dan kekeringan | 2.11 | Penanggulangan banjir dan kekeringan | Pembangunan Pos Pemantauan Hidrologi (terutama curah hujan dan TMA) | Tertanggulangnya banjir dan kekeringan | Terbangunnya Pos Pemantauan Hidrologi dan tersedianya data penanggulangan banjir melalui 6 AWLR di 6 lokasi: Sangkulman, Desa Semayang, Muara Enggelam, Muara Muntai, Muara Ohong, dan Tanjung Isuy (saat ini sudah ada 1 AWLR di Sangkulman) | Dinas PUTRPR Kaltim, BWS, BPDASHL | Dinas PU dan Dinas LH Kab Kaltim, Kukar, Kutim dan Mahulu. Masyarakat dan Dunia Usaha. |
| | | | | Penyuluhan penanggulangan banjir dan kekeringan | Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam pengurangan resiko banjir dan kekeringan | Terlaksananya penyuluhan di 10 desa | BPBD Kaltim, BWS, BPDASHL | BPBD, Dinas PU dan Dinas LH Kab Kukar, Kubar, Kuti, dan Mahulu. Masyarakat dan dunia usaha. |
| | | | | Pembangunan Pos Evakuasi | Berkurangnya dampak bencana di kawasan danau | Terbangunnya pos evakuasi di 10 desa | BPBD Kaltim, BWS, BPDASHL | BPBD, Dinas PU dan Dinas LH Kab Kukar, Kubar, Kuti, dan |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|---|---|---------|---------------------------|---|--|---|---|---|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | | | | | Mahulu. Masyarakat dan dunia usaha. |
| | | | | Pembentukan Tim Reaksi Cepat | Berkurangnya dampak bencana di kawasan danau | Terbentuknya Tim Reaksi Cepat di 10 desa | BPBD Kaltim, BWS, BPDASHL | BPBD, Dinas PU dan Dinas LH Kab Kukar, Kubar, Kutim, dan Mahulu. Masyarakat dan dunia usaha. |
| | | | | Pembangunan pengaman gelombang (fisik) | Berkurangnya dampak bencana di kawasan danau | Terbangunnya pengaman gelombang di 10 desa | BPBD Kaltim, BWS, BPDASHL | BPBD, Dinas PU dan Dinas LH Kab Kukar, Kubar, Kutim, dan Mahulu. Masyarakat dan dunia usaha. |
| | | | | Fasilitasi dan Pembinaan pengolahan ikan yang potensial mati massal | Berkurangnya dampak bencana di kawasan danau dan peningkatan nilai ekonomi | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pengolahan ikan di 10 desa | BPBD, Dinas Perikanan dan Kelautan Kaltim, BWS, BPDASHL | BPBD, Dinas PU dan Dinas LH Kab Kukar, Kubar, Kutim, dan Mahulu. Masyarakat dan dunia usaha. |
| Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Sempadan Danau dan Sungai | | | | | | | | |
| 10 | Meningkatnya tekanan di daerah sempadan danau | 3.1. | Penataan kawasan sempadan | Penetapan batas sempadan danau dan zona perlindungannya | Pemanfaatan sempadan danau memperhatikan batas dan fungsinya sebagai kawasan lindung | Ditetapkan, disosialisasikan dan dilaksanakannya monev tentang batas sempadan danau | Dinas PUTRPR Kaltim, BWS, BPDASHL | Bappeda dan Dinas LH Kaltim, Bappeda, Dinas LH dan Dinas PU Kukar, Kubar, Kutim, Mahulu, BWS, BPDASHL, masyarakat dan dunia usaha |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|--|----------------------|---------|----------------------------------|---|---|--|--|---|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | Pengendalian izin pertanian, perkebunan sawit, pertambangan dan permukiman | Pemanfaatan sempadan danau memperhatikan batas dan fungsinya sebagai kawasan lindung | Dilaksanakannya pengendalian izin pemanfaatan sempadan danau | Dinas PUTRPR Kaltim, BWS, BPDASHL | Bappeda dan Dinas LH Kaltim, Bappeda, Dinas LH dan Dinas PU Kukar, Kubar, Kutim, Mahulu, BWS, BPDASHL, masyarakat dan dunia usaha |
| | | 3.2. | Penataan kawasan sempadan sungai | Pengaturan pemanfaatan sempadan sungai bagi kegiatan transportasi, keramba, MCK dan sumber pencemar lainnya | Pemanfaatan sempadan sungai memperhatikan batas dan fungsinya sebagai kawasan lindung | Dilaksanakannya pengaturan sempadan sungai di 9 desa | DLH dan Dinas PU Kaltim, BWS, BPDASHL | Bappeda, Dinas Pertanian dan TP, Dinas ESDM, dan Disbun Kaltim. Bappedam Dinas LH dan Dinas PU Kukar, Kubar, Kutim dan Mahulu. Masyarakat dan dunia usaha |
| Strategi 4. Penyelamatan Daerah Tangkapan Air | | | | | | | | |
| 11 | Degradasi fungsi DAS | 4.1. | Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Penyusunan rencana rehabilitasi lahan kritis di DTA Danau | Peningkatan kondisi DTA | Terlaksananya RHL seluas 2.500 ha | Dishut Kaltim, BPDASHL, DLH Kukar, Kubar, Kutim dan Mahulu | Bappeda Kaltim, DLH Kaltim, Dinas Perikanan dan Kelautan Kaltim, BWS, masyarakat dan dunia usaha |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|---|---|--|--|---|--|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | Pengendalian perijinan perkebunan sawit baru di DTA | Peningkatan kondisi DTA | Tersusunnya peta arahan terlaksananya movev perizinan | Dinas LH, Dinas Kehutanan dan Dinas PUTRPR Kaltim | Bappeda, Dinas ESDM, Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim, BWS, BPBD, DLH Kukar, Kubar, Kutim, Mahulu, masyarakat dan dunia usaha |
| | | | | Pengawasan pembukaan lahan dan penerapan zero burning | Terkendalinya kerusakan DTA akibat kebakaran lahan | Tersusun, tersosialisasi dan diimplementasikan Rencana Tindak Pengawasan Kegiatan Pembukaan Lahan dan Penerapan Zero Burning | Dinas Kehutanan dan BPBD Kaltim, BPDASHL | Bappeda, Dinas ESDM, Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim, BWS, BPBD, DLH Kukar, Kubar, Kutim, Mahulu, masyarakat dan dunia usaha |
| | | 4.2. | Pengembangan pertanian ramah lingkungan | Pengembangan peta potensi pertanian | Berkembangnya pertanian ramah lingkungan | Tersedianya peta potensi pertanian dan rencana pengelolaan pertanian melingkupi 10 desa | Dinas Pertanian TP dan Dinas PUPR TR Kaltim. Dinas Pertanian TP dan Dinas PU Kab Kukar, Kubar, Kutim dan Mahulu | Bappeda Kaltim, Bappeda Kab Kukar, Kubar, Kutim dan Mahulu. Masyarakat dan dunia usaha. |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|--|---|-------------------------------|---|---|---|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | Pembuatan saluran pembuang air di sawah/rawa terutama di Tubuhan dan Kahala | Berkurangnya beban pencemaran | Terbangunnya saluran pembuang di sawah/rawa terutama di Tubuhan dan Kahala di 10 desa | Dinas Pertanian TP dan Dinas PUPR TR Kaltim. Dinas Pertanian TP dan Dinas PU Kab Kukar, Kubar, Kutim dan Mahulu | Bappeda Kaltim, Bappeda Kab Kukar, Kubar, Kutim dan Mahulu. Masyarakat dan dunia usaha. |
| | | | | Pemanfaatan kompos dan herbisida organik | Berkurangnya beban pencemaran | Tersedianya kompos dan herbisida organik di 10 desa | Dinas Pertanian TP dan Dinas PUPR TR Kaltim. Dinas Pertanian TP dan Dinas PU Kab Kukar, Kubar, Kutim dan Mahulu | Bappeda Kaltim, Bappeda Kab Kukar, Kubar, Kutim dan Mahulu. Masyarakat dan dunia usaha. |
| | | | | Pengendalian limbah pertanian untuk mengurangi kesuburan perairan | Berkurangnya beban pencemaran | Tekelolanya limbah pertanian di 10 desa | Dinas Pertanian TP dan Dinas PUPR TR Kaltim. Dinas Pertanian TP dan Dinas PU Kab Kukar, Kubar, Kutim dan Mahulu | Bappeda Kaltim, Bappeda Kab Kukar, Kubar, Kutim dan Mahulu. Masyarakat dan dunia usaha. |

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | | |
|--|--|---------|------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| Strategi 5. Peningkatan Peran Serta dan Kesejahteraan Masyarakat | | | | | | | | |
| 12 | Perlu ditingkatkannya peran serta para pihak | 5.1. | Peningkatan peran serta masyarakat | Fasilitasi pelaksanaan kegiatan konservasi danau berbasis masyarakat | Meningkatnya peran serta masyarakat | Terlaksananya 7 kegiatan konservasi danau berbasis masyarakat | DLH, Dinas PUTRPR dan BPBD Kaltim. Pemkab Kukar, Kubar, Kutim dan Mahulu, BWS, BPDASHL | Bappeda, Dishut, Distamben, DPK, Distan TP, Disperindagkop, Dinas Pariwisata dan Dinas Sosial Kaltim. masyarakat dan dunia usaha. |
| | | | | Penyuluhan dan pembuatan percontohan ekowisata dan pembangkitan budaya lokal dengan memanfaatkan CSR | Meningkatnya peran serta masyarakat | Terlaksananya penyuluhan dan pembuatan percontohan ekowisata dan pembangkitan budaya lokal di 10 desa dan terlaksananya 7 program/kegiatan ekowisata | DLH, Dinas PUTRPR dan BPBD Kaltim. Pemkab Kukar, Kubar, Kutim dan Mahulu, BWS, BPDASHL | Bappeda, Dishut, Distamben, DPK, Distan TP, Disperindagkop, Dinas Pariwisata dan Dinas Sosial Kaltim. masyarakat dan dunia usaha. |
| | | 5.2. | Peningkatan sanitasi lingkungan | Pembangunan sarpras sanitasi | Meningkatnya sanitasi lingkungan | Terbangunnya sarpras sanitasi di 10 desa | DLH, Dinas PUTRPR dan BPBD Kaltim. Pemkab Kukar, Kubar, Kutim dan Mahulu, BWS, BPDASHL | Bappeda, Dishut, Distamben, DPK, Distan TP, Disperindagkop, Dinas Pariwisata dan Dinas Sosial Kaltim. masyarakat dan dunia usaha. |

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---|------------------------------------|---|---|--|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | 5.3. Pengembangan perekonomian ramah lingkungan | Pengembangan UMKM ramah lingkungan | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan tetap ramah lingkungan | Terbentuk dan aktifnya kegiatan 10 UMKM | DLH, Dinas PUTRPR dan BPBD Kaltim. Pemkab Kukar, Kubar, Kutim dan Mahulu, BWS, BPDASHL | Bappeda, Dishut, Distamben, DPK, Distan TP, Disperindagkop, Dinas Pariwisata dan Dinas Sosial Kaltim. masyarakat dan dunia usaha. |

10. DANAU TONDANO

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | | |
|---|--|---------|--------------------------------|--|--|---|---|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| Strategi 1. Penataan Ruang dan Koordinasi Pengelolaan | | | | | | | | |
| 1 | Kerusakan sempadan danau dan konflik pemanfaatan ruang | 1.1. | Penataan Ruang | Penyusunan, Penetapan, Sosialisasi dan Implementasi RDTR Kawasan Danau dan sempadan | Pemanfaatan ruang yang memperhatikan batas danau, batas sempadan dan aturan pemanfaatannya | Tersusun, ditetapkan, disosialisasikan dan diimplementasi -kannya RDTR Kawasan Danau | DLH, Bapelitbangda dan Setda Bag Hukum Kab Minahasa | DLH Sulut, Dinas PUTR dan BPN Kab Minahasa |
| | | | | Penyusunan, Penetapan, Sosialisasi dan Implementasi zonasi Danau Tondano | Pemanfaatan danau yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan | Tersusun, ditetapkan, disosialisasikan dan diimplementasi -kannya zonasi Danau Tondano | DLH, Bapelitbangda dan Setda Bag Hukum Kab Minahasa | DLH Sulut, Dinas PUTR dan BPN Kab Minahasa |
| 2. | Belum tertata dan terkoordinasinya Pengelolaan Danau Tondano | 1.2. | Koordinasi Pengelolaan Danau | Penyusunan, Penetapan, Sosialisasi dan Implementasi Perda Kabupaten Minahasa tentang Pengelolaan dan Pelestarian Danau Tondano | Pengelolaan Danau Tondano yang berkelanjutan tertata dan terkoordinasi | Tersusun, ditetapkan, disosialisasikan dan diimplementasi -kannya Perda Pengelolaan Danau Tondano | DLH, Bapelitbangda dan Setda Bag Hukum Kab Minahasa | DLH Sulut, Dinas PUTR dan BPN Kab Minahasa |
| Strategi 2. Penyelamatan Ekosistem Perairan Danau | | | | | | | | |
| 3. | Menurunnya kualitas air danau | d. | Pengelolaan kualitas air danau | Penetapan baku mutu air dan status trofik danau | Tersedianya acuan pengelolaan kualitas air | Tersusun, ditetapkan, disosialisasikan dan diimplementasi -kannya SK Bupati tentang Baku Mutu Air dan status trofik danau | DLH, Bapelitbangda dan Setda Bag Hukum Kab Minahasa | DLH Sulut, Dinas PUTR dan BPN Kab Minahasa |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|--|---|---------------------------|---|--|--|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | 2.2. | Pengendalian pencemaran air dari limbah rumah tangga | Revitalisasi sistem septictank komunal yang telah ada dan pembangunan septictank baru | Meningkatnya kualitas air | Terlaksananya revitalisasi saluran dan septictank komunal di 1 desa dan pembangunan saluran dan septictanck komunal di 4 desa | DLH dan Dinas PU Kab Minahasa | Camat dan Kades di sekitar Danau Tondano |
| | | | | Pembangunan pengolahan limbah rumah tangga menjadi biogas | Meningkatnya kualitas air | Terlaksananya pembangunan sarpras pengolahan limbah menjadi biogas di 3 desa | DLH dan Dinas PU Kab Minahasa | Camat dan Kades di sekitar Danau Tondano |
| | | 2.3. | Pengendalian pencemaran air dari kegiatan pertanian | Pengembangan dan pembinaan pertanian ramah lingkungan | Meningkatnya kualitas air | Terlaksananya pengembangan dan pembinaan pertanian ramah lingkungan di 5 desa | Dinas Pertanian, DLH dan Dinas PU Kab Minahasa | Camat dan Kades di sekitar Danau Tondano |
| | | 2.4. | Pengendalian pencemaran air dari kegiatan perikanan budidaya | Pembatasan jumlah dan area perikanan budidaya, serta pengembangan, sosialisasi dan implementasi disain KJA ramah lingkungan | Meningkatnya kualitas air | Terlaksananya pembatasan jumlah dan area perikanan budidaya, serta pengembangan, sosialisasi dan implementasi disain KJA ramah lingkungan di 5 desa dan penurunan jumlah KJA dari 9833 unit | Dinas Perikanan, DLH dan Dinas PU Kab Minahasa | Camat dan Kades di sekitar Danau Tondano |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--|---------|---|---|---|--|---|--|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | | | menjadi 4000 unit | | |
| 4. | Banyaknya eceng gondok di danau | 2.5. | Pengendalian dan pemanfaatan eceng gondok | Pembersihan dan pemanfaatan eceng gondok menjadi pupuk, pakan dan biogas | Terkendalinya gulma air/ecenggondok | Terlaksananya pembersihan dan pemanfaatan eceng gondok serta fasilitasi sarpras pengambilan dan pengolahan eceng gondok di 5 desa dan penurunan luas eceng gondok dari 222 ha menjadi 100 ha | DLH dan Dinas PU Kab Minahasa | Camat dan Kades di sekitar Danau Tondano |
| | | | | Pembangunan dermaga dan dumping area ecenggondok | Terkendalinya gulma air/ecenggondok | Dibangunnya dermaga dan dumping area eceng gondok | DLH dan Dinas PU Kab Minahasa | Camat dan Kades di sekitar Danau Tondano |
| 5. | Banyaknya sampah di danau dan sekitarnya | 2.6. | Pengelolaan sampah | Penyusunan, sosialisasi dan implementasi SK Bupati tentang Pengelolaan Sampah di danau dan sekitarnya | Terkelolanya sampah di danau dan sekitarnya | Tersusun, ditetapkan, disosialisasikan dan diimplementasi kannya SK Bupati tentang pengelolaan sampah di sekitar danau | DLH, Bapelitbangda dan Setda Bag Hukum Kab Minahasa | DLH Sulut, Dinas PUTR dan BPN Kab Minahasa |
| | | | | Penyediaan sarpras pengolahan sampah | Terkelolanya sampah di danau dan sekitarnya | Tersedianya sarpras pengolahan sampah di 5 desa | DLH dan Dinas PU Kab Minahasa | Camat dan Kades di sekitar Danau Tondano |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|---|---|---------|--------------------------------|---|--|---|----------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| 6. | Sedimentasi danau | 2.7. | Pengendalian sedimentasi danau | Revitalisasi Danau Tondano | Terkendalinya sedimentasi danau | Terlaksananya revitalisasi danau (lanjutan program) | Dinas PU Kab Minahasa, BWS | DLH dan Dinas PUTR Sulut |
| | | | | Pengerukan sedimen | Terkendalinya sedimentasi danau | Badan air danau bertambah luas dari 4.616 ha menjadi 5.000 ha dan kedalaman rata-rata danau menjadi lebih dalam, dari 15 m menjadi 17 m | Dinas PU Kab Minahasa, BWS | DLH dan Dinas PUTR Sulut |
| | | | | Pembangunan cek dam pengendali sedimen | Terkendalinya sedimentasi danau | Terlaksananya pembangunan cek dam pengendali sedimen | Dinas PU Kab Minahasa, BWS | DLH dan Dinas PUTR Sulut |
| Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Sempadan Danau | | | | | | | | |
| 7. | Pemanfaatan lahan sempadan danau yang tidak tertata, dan berdampak mencemari/ merusak danau | 3.1. | Penataan kawasan sempadan | Penentuan dan penetapan batas sempadan | Pemanfaatan sempadan memperhatikan batas dan fungsinya sebagai kawasan lindung | Tersedianya dasar peraturan dan acuan batas dan pemanfaatan sempadan | Dinas PU Kab Minahasa, BWS | DLH dan Dinas PUTR Sulut |
| | | | | Penertiban dan relokasi bangunan ilegal di sempadan danau | Pemanfaatan sempadan memperhatikan batas dan fungsinya sebagai kawasan lindung | Tidak ada lagi bangunan yang menyalahi aturan di sempadan danau | Dinas PUTR, BPN | Dinas LH |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|---|--|---------|------------------------------|--|--|--|----------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | Penanaman pohon batas sempadan danau | Pemanfaatan sempadan memperhatikan batas dan fungsinya sebagai kawasan lindung | Tertanamnya pohon pembatas di sempadan danau | DLH, BPDASHL, Dishut | DLH |
| 8. | Banjir di sekitar danau | 3.2. | Penanggulangan banjir | Pembangunan greenbelt dan pemeliharaan natural area peresapan air dan kolam penyimpanan air | Tertanggulangnya banjir | Dilaksanakannya pembangunan greenbelt (dengan penanaman di sempadan) serta pemeliharaan area resapan dan kolam penyimpanan air | DLH, BPDASHL, Dishut | DLH |
| | | | | Survey, investigasi, pembuatan disain dan pembangunan drainase dan tanggul pengendali banjir di permukiman | Tertanggulangnya banjir | Terlaksananya survey, investigasi, pembuatan disain dan pembangunan drainase dan tanggul pengendali banjir di permukiman | Dinas PU Kab Minahasa, BWS | DLH dan Dinas PUTR Sulut |
| Strategi 4. Penyelamatan Daerah Tangkapan Air | | | | | | | | |
| 8. | Tingginya laju erosi, run off dan sedimentasi dari DTA | 4.1. | Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Pembuatan bangunan sipil teknis | Penurunan laju erosi | Dilaksanakannya pembuatan 100 unit bangunan sipil teknis pengendali erosi di DTA Danau Tondano | BPDASHL, Dishut | KLHK |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|---|--|---------|---|--|--|---|-------------------------------|--|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | Reboisasi dan penghijauan | Penurunan laju erosi dan luas lahan kritis | Penanaman vegetasi pengendali erosi hingga mencapai minimal 30% luas DTA | BPDASHL, Dishut | KLHK |
| Strategi 5. Pengembangan Sistem Monitoring, Evaluasi dan Informasi Ekosistem Danau | | | | | | | | |
| 9. | Terbatasnya data dan informasi ekosistem danau | 5.1. | Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kondisi danau (kualitas air, hidrologi, morfometri, keanekaragaman hayati dan pemanfaatan danau) | Tersedianya acuan bagi pengelolaan danau | Tersedianya data kondisi danau (kualitas air, hidrologi, morfometri, keanekaragaman hayati dan pemanfaatan danau) | DLH dan DPU Kab Minahasa, BWS | DLH dan Dinas PUTR Sulut, BIG, LIPI, BPS |
| | | 5.2. | Pengembangan basis data dan informasi kondisi danau | Pengembangan basis data dan akses informasi bagi para pihak | Tersedianya acuan bagi pengelolaan danau | Tersedia dan teraksesnya data dan informasi kondisi danau | DLH, DPU, Kab Minahasa, BWS | DLH dan Dinas PUTR Sulut |
| Strategi 6. Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Peran Para Pihak | | | | | | | | |
| 10 | Perlu dikembangkannya kelembagaan dan ditingkatkannya peran para pihak | 6.1. | Pengembangan kelembagaan terpadu | Pembentukan kelembagaan terpadu penyelamatan danau | Pengelolaan terkoordinasi antar para pihak | Terbentuknya kelembagaan pengelolaan danau yang melibatkan para pihak terkait | Bappeda | DLH |
| | | 6.2. | Peningkatan peran para pihak | Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan para pihak lainnya | Masyarakat dan para pihak lainnya terlibat aktif | Terwujudnya pariwisata yang melibatkan peran masyarakat dan para pihak lainnya di 3 desa | Dinas Pariwisata | Bappeda, DLH |

11. DANAU LIMBOTO

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | | |
|---|---|---------|--------------------------------|--|--|---|--|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| Strategi 1. Penataan Ruang | | | | | | | | |
| 1 | Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan terjadinya konflik pemanfaatan ruang | 1.1. | Penataan Ruang | Penetapan wilayah dan sertifikasi ekosistem Danau Limboto | Kejelasan status hak/ kewenangan pengelolaan Danau Limboto | Ditetapkannya batas ekosistem danau yang disepakati oleh para pihak dan disertifikasi | Kem PUPR (BWS), ATR/BPN | Bappeda, Dinas LH, Dinas PU, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi |
| | | | | Penyusunan, penetapan dan sosialisasi Pergub tentang Zonasi Danau | Acuan pengendalian pemanfaatan danau | Tersusun, ditetapkan dan disosialisasikannya Pergub tentang Zonasi Danau | Bag Hukum Setda, Bappeda dan DPRD Provinsi | Dinas LHK, Dinas Perikanan dan Kelautan |
| Strategi 2. Penyelamatan Ekosistem Perairan Danau | | | | | | | | |
| 2. | Menurunnya kualitas air danau | e. | Pengelolaan kualitas air danau | Penetapan Kelas Air Danau | Pemanfaatan danau sesuai dengan peruntukan dan daya dukung daya tampung lingkungan | Ditetapkan dan diimplementasikannya Pergub tentang Kelas Air | Kem PUPR (BWS) dan KLHK (BPDASHL) | DLHK Prov, Kab dan Kota, Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan |
| | | | | Penyusunan Perda Penetapan daya dukung dan daya tampung beban pencemaran air | Pemanfaatan danau sesuai dengan peruntukan dan daya dukung daya tampung lingkungan | Tersusun dan ditetapkannya Perda tentang DTBPA Danau Limboto | Kem PUPR (BWS) dan KLHK (BPDASHL) | DLHK Prov, Kab dan Kota, Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|----|---------------------------------|---------|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | Pemantauan kualitas air | Pemanfaatan danau sesuai dengan peruntukan dan daya dukung daya tampung lingkungan | Terlaksananya pemantauan kualitas air secara lengkap, detil dan berkala, dan tersedianya data kualitas air | Dinas LH Prov | Dinas LH Kab, Kota dan BWS |
| | | 2.2. | Pengamanan dan perlindungan ekosistem danau | Patroli bersama terhadap kegiatan-kegiatan di danau | Terkendalinya kegiatan yang tidak sesuai peruntukan ruang/perairan danau (antara lain budidaya perikanan dengan KJA) | Terlaksananya kegiatan pengamanan Danau Limboto secara terpadu | Satpol PP Prov, Kab dan Kota Gorontalo | POLRI |
| | | 2.3. | Pengendalian pencemaran air di perairan dan DTA | Pengendalian pencemaran air dari sumbernya | Tercapainya peningkatan status mutu air dari eutrofik menjadi mesotrofik, dan kualitas air menjadi sesuai persyaratan Kelas II | Terlaksananya pengendalian pencemaran air dari sumbernya di perairan maupun DTA | Kem PUPR (BWS) dan KLHK (BPDASHL) | DLHK Prov, Kab dan Kota, Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan |
| | | | | Sosialisasi KJA ramah lingkungan | Berkurangnya beban pencemaran air dari KJA | KJA menjadi ramah lingkungan sebanyak 2559 unit | DLHK Prov, Kab dan Kota, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan | Bappeda Prov, Kab dan Kota |
| 3. | Banyaknya eceng gondok di danau | 2.4. | Pengendalian eceng gondok | Pemanenan eceng gondok secara mekanik (dengan kapal sedot) | Berkurangnya tutupan eceng gondok | Menurunnya luasan tutupan eceng gondok sebesar 80% | DLHK Kota, Kabupaten, Dinas Pariwisata dan | Bappeda Prov, Kab dan Kota |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|--|---|---------|---------------------------|---|---|--|--|---|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | | | | Ekonomi Kreatif | |
| | | | | Pemanfaatan eceng gondok | Berkurangnya tutupan eceng gondok | Terbangunnya 5 UMKM pengolah eceng gondok | DLHK Kota, Kabupaten, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Bappeda Prov, Kab dan Kota |
| 4. | Sedimentasi danau | 2.5. | Pengendalian sedimentasi | Pengerukan sedimen danau | Berkurangnya sedimen danau dan meningkatnya kecerahan air danau | Terlaksananya pengerukan sebanyak 6.000.000 m ³ dalam 5 tahun | Kem PUPR (BWS) | Dinas PUPR Prov, Kab dan Kota Gorontalo |
| | | | | Pembentukan unit usaha pembuat batu bata/batako dari sedimen | Berkurangnya sedimen danau dan terciptanya usaha masyarakat | Tebentuknya 10 unit usaha pembuatan batu bata/batako dari sedimen | Dinas PUPR Prov dan Perguruan Tinggi | Dinas PUPR Prov, Kab dan Kota Gorontalo |
| Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Sempadan Danau | | | | | | | | |
| 5. | Pemanfaatan lahan sempadan danau yang tidak tertata, dan berdampak mencemari/ merusak danau | 3.1. | Penataan kawasan sempadan | Penyusunan dan penetapan Perda tentang batas sempadan danau Limboto | Pemanfaatan sempadan memperhatikan batas dan fungsinya sebagai kawasan lindung sesuai PP No 26 Tahun 2008 tentang RTRWN | Tersusun dan ditetapkannya Perda batas sempadan Danau Limboto | Bag Hukum Setda Prov, DPRD Prov dan ATR/BPN | Bappeda, Dinas LH dan Dinas PU Provinsi |
| | | | | Pemasangan patok batas sempadan danau | Pemanfaatan sempadan memperhatikan batas dan fungsinya sebagai kawasan lindung sesuai PP No 26 Tahun 2008 tentang RTRWN | Dipasang patok batas sempadan danau di 600 titik | Bag Hukum Setda, Dinas PUPR dan Bappeda Provinsi, ATR/BPN | BWS, DLHK Prov, Kab dan Kota |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|---|---|---------|--------------------------------|---|---|--|--|---|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | Pembangunan greenbelt di sekeliling danau | Pemanfaatan sempadan memperhatikan batas dan fungsinya sebagai kawasan lindung sesuai PP No 26 Tahun 2008 tentang RTRWN | Terlaksananya pembangunan greenbelt sebagai batas vegetatif agar tidak terjadi penyempitan luasan ekosistem danau Limboto | BWS, Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, Dinas LHK Prov, BPDASHL | Bappeda dan Dinas LHK Kab/Kota |
| | | | | Pembangunan sarpras jalan di sekeliling danau (roadbelt) | Pemanfaatan sempadan memperhatikan batas dan fungsinya sebagai kawasan lindung sesuai PP No 26 Tahun 2008 tentang RTRWN | Terlaksananya pembangunan sarpras jalan (roadbelt) sebagai infrastruktur batas agar tidak terjadi penyempitan luasan ekosistem danau Limboto | BWS, Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, Dinas LHK Prov, BPDASHL | Bappeda dan Dinas LHK Kab/Kota |
| Strategi 4. Penyelamatan Daerah Tangkapan Air | | | | | | | | |
| 6. | Tingginya potensi pencemaran di DTA danau | 4.1. | Pengendalian pencemaran di DTA | Pembangunan sarpras sanitasi di sekitar danau dan DTA danau | Menurunnya beban pencemaran dari limbah rumah tangga dan industri di DTA danau | Terbangunnya septic tank di wilayah permukiman di dekat danau | Dinas Perkim dan Dinas Kesehatan Provinsi | Bappeda, Dinas LHK dan Dinas PUPR Provinsi |
| | | | | Pengawasan dan penertiban ijin pembuangan air limbah | Menurunnya beban pencemaran dari limbah kegiatan usaha di DTA danau | 100% kegiatan di sempadan danau yang membuang limbah memiliki ijin pembuangan air limbah | Dinas LHK dan Dinas Kesehatan Provinsi | Bappeda, Dinas LHK dan Dinas Kesehatan Kab/Kota |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|----|---|---------|---|--|--|---|---|--|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| 7. | Lahan kritis, erosi, banjir dan sedimentasi | 4.2. | Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Pembuatan sumur resapan untuk mengendalikan aliran permukaan | Terkendalnya aliran permukaan | Terlaksananya pembuatan 100 unit sumur resapan dan 100 biopori per tahun | BWS, BPDASHL, Dinas PUPR dan Dinas LHK Provinsi | Dinas LHK, Dinas PUPR dan Dinas Pertanian Kab/Kota |
| | | | | Penanaman di lahan kritis | Penurunan luas lahan kritis hingga 50% dalam 5 tahun | Dilaksanakannya penambahan penanaman tutupan lahan kritis seluas 5.000 ha dalam 5 tahun | BPDASHL, BWS, Dinas LHK dan Dinas PUPR Provinsi | Bappeda, Dinas LHK dan Dinas PUPR Kab/Kota |
| | | | | Pembangunan sarpras pengendali sedimen | Berkurangnya sedimentasi sebesar 50% | Terbangunnya 25 unit cek dam pengendali sedimen | BPDASHL, BWS, Dinas LHK dan Dinas PUPR Provinsi | Bappeda, Dinas LHK dan Dinas PUPR Kab/Kota |
| | | | | Pembangunan dam penahan (groundsill) | Berkurangnya wilayah banjir sebesar 50% | Terbangunnya 20 unit dam penahan per tahun | BPDASHL, BWS, Dinas LHK dan Dinas PUPR Provinsi | Bappeda, Dinas LHK dan Dinas PUPR Kab/Kota |
| | | 4.3. | Pengendalian sedimentasi dan banjir secara infrastruktur pekerjaan umum | Normalisasi sungai yang mengarah ke Danau Limboto | Berkurangnya sedimentasi di danau sebesar 50% | Terlaksananya kegiatan normalisasi 5 sungai yang bermuara ke danau | BPDASHL, BWS, Dinas LHK dan Dinas PUPR Provinsi | Bappeda, Dinas LHK dan Dinas PUPR Kab/Kota |

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | | |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| Strategi 5. Pemantauan, Evaluasi dan Pengembangan Basis Data dan Sistem Informasi | | | | | | | | |
| 8 | Keterbatasan data dan informasi danau yang terbaharui | 5.1. Pengembangan sistem informasi danau | Pembuatan peta dan karakteristik morfometri, neraca LH danau, morfologi, hidrologi, hidrobiologi dan batimetri danau serta penyediaan data jenis-jenis ikan khas yang perlu dilindungi | Tersedianya data dan informasi sebagai acuan pengelolaan | Tersedianya peta dan karakteristik morfometri, neraca LH danau, morfologi, hidrologi, hidrobiologi dan batimetri danau, serta data jenis-jenis ikan khas yang perlu dilindungi | Kemenristek, Pusat Limnologi LIPI, BIG dan BPS | BWS, Dinas LHK Prov, Kab dan Kota, Dinas PU dan Dinas Perikanan dan Kelautan | |
| Strategi 6. Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Peran Para Pihak | | | | | | | | |
| 9 | Perlu dikembangkannya kelembagaan dan ditingkatkannya peran para pihak | 6.1. Pengembangan koordinasi antar pihak dalam pengelolaan danau | Pembentukan forum komunikasi para pihak | Meningkatnya koordinasi para pihak dalam pengelolaan danau | Terbentuknya forum komunikasi para pihak | Bappeda Provinsi | Bappeda Kab dan Kota Gorontalo | |
| | | 6.2. Peningkatan pemahaman para pihak | Sosialisasi pengelolaan danau kepada para pihak termasuk pengambil kebijakan | Meningkatnya pemahaman para pihak | Terlaksananya kegiatan sosialisasi setiap tahun | BWS, BPDASHL, Dinas LHK, Dinas Perikanan dan Kelautan | Dinas LHK dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota, Perguruan Tinggi | |
| | | 6.3. Pengembangan ekowisata danau | Pembangunan kawasan wisata danau ramah lingkungan | Terwujudnya wisata ramah lingkungan | Terbangunnya kawasan wisata danau ramah lingkungan | BWS, BPDASHL, Dinas LHK, Dinas Perikanan dan Kelautan | Dinas LHK dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota, Perguruan Tinggi | |

12. DANAU POSO

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | | |
|---|--|---------|--------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| Strategi 1. Penataan Ruang | | | | | | | | |
| 1 | Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup | 1.1. | Penataan Ruang | Penyusunan dan penetapan RTR Kawasan Danau dengan menerapkan KLHS | Pemanfaatan ruang sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung LH | Tersusun, ditetapkan, disosialisasikan dan diimplementasikannya RTR Kawasan Danau Poso | Dinas LH dan Bapelitbangda Prov dan Kab, DPRD | DLH Provinsi |
| | | | | Penyusunan zonasi perairan danau | Pemanfaatan ruang sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung LH | Tersusun, ditetapkan, disosialisasikan dan diimplementasikannya zonasi perairan Danau Poso | Dinas LH dan Bapelitbangda Prov dan Kab, BWS | KLHK, Kem PUPR |
| Strategi 2. Penyelamatan Ekosistem Perairan Danau | | | | | | | | |
| 2. | Menurunnya kualitas air danau | f. | Pengelolaan kualitas air danau | Penentuan status mutu air danau | Pemanfaatan danau sesuai daya dukung dan daya tampung LH | Ditentukannya status mutu air danau sebagai acuan pengelolaan kualitas air | DLH, Bapelitbangda Prov dan Kab | KLHK |
| | | | | Pemantauan kualitas air | Pemanfaatan danau sesuai daya dukung dan daya tampung LH | Dilaksanakannya pemantauan kualitas air 2 kali dalam setahun dan tersedianya data hasil pemantauan kualitas air | DLH, Bapelitbangda Prov dan Kab | KLHK |
| 3. | Sedimentasi danau | 2.2. | Pengendalian sedimentasi | Pengerukan sedimen danau | Berkurangnya pendangkalan danau | Terlaksananya pengerukan sedimen | BWS, Dinas PU | Kem PUPR, Kem Pertanian, KLHK |
| | | | | Pemanfaatan sedimen | Meningkatnya volume tampung perairan danau | Termanfaatkannya sedimen | BWS, Dinas PU, Dinas Pertanian | Dinas Pertanian Prov Bali |

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | | |
|---|---|---------|---|--|---|---|--|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| 4. | Penurunan keanekaragaman hayati | 2.3. | Pengembangan perikanan tangkap ramah lingkungan | Pembinaan perikanan tangkap | Perikanan tangkap berkelanjutan | Dilaksanakannya pembinaan perikanan tangkap | Dinas KKP | KKP dan KLHK |
| | | 2.4. | Pelestarian keanekaragaman hayati | Penertiban penangkapan ikan endemik | Lestarnya ikan endemik | Terwujudnya instrumen penertiban serta disosialisasikan dan diimplementasikannya penertiban perikanan tangkap | Dinas KKP | KKP dan KLHK |
| | | | | Restocking (penebaran bibit) ikan endemik | Peningkatan populasi ikan endemik | Dilaksanakannya restocking ikan endemik | Dinas KKP, DLH | KKP dan KLHK |
| | | | | Pelarangan restocking (penebaran bibit) ikan spesies asing invasif | Lestarnya ikan endemik | Dilaksanakannya pelarangan restocking ikan species asing invasif | Dinas KKP, DLH | KKP dan KLHK |
| 5. | Belum tertatanya pemanfaatan air | 2.5. | Penataan pemanfaatan air | Penyusunan Masterplan penataan pemanfaatan air danau (termasuk studi kelayakan PLTA yang memperhatikan ekosistem, dan studi penyediaan air baku) | Tertatanya pemanfaatan air | Tersusun dan disosialisasikannya Masterplan penataan pemanfaatan air danau | Kem PUPR, Kem ESDM, Dins PUPR Prov dan Kab, Dinas ESDM Prov dan Kab, Dinas LH Prov dan Kab | KLHK, Kemenristek Dikti, LIPI, PT Poso Energy |
| Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Sempadan dan Daerah Tangkapan Air | | | | | | | | |
| 6. | Lahan kritis, erosi, sedimentasi, banjir dan pencemaran dari sempadan/DTA | 3.1. | Pengembangan pertanian yang menerapkan prinsip konservasi tanah dan air | Penyuluhan pertanian yang menerapkan pola teras dan rorak serta menggunakan | Berkurangnya sedimen dan beban pencemaran yang masuk ke danau | Telaksananya pelatihan penerapan pertanian berprinsip KTA | Dinas Pertanian | LSM, KLHK |

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | | |
|----|--------------|---------|--|---|--|---|---|----------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | | | | bahan organik untuk pupuk dan pestisida | | | | |
| | | 3.2. | Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) secara vegetatif | Penanaman di lahan kritis | Berkurangnya lahan kritis | Dilaksanakannya RHL 1000 ha (Saat ini luas lahan sangat kritis mencapai 5.182,24 ha, dan luas lahan kritis mencapai 2.081,04 ha) | BPDASHL, KPH, DLH, PLTA Poso Energy, Dinas PUPR | Dishut Prov, DLH Prov, BWS |
| | | 3.3. | RHL sipil teknis dan pembangunan infrastruktur pengendali erosi/sedimentasi dan banjir | Pembuatan bangunan sipil teknis pengendali erosi meliputi gully plug, turap/bronjong pelindung tebing, dam penahan/check dam dan dam pengendali | Penurunan laju erosi | Dilaksanakannya pembuatan bangunan pengendali erosi (saat ini erosi aktua mencapai 556.475.3 ton/tahun, dan erosi potensial mencapai 19.511.541,56 ton/tahun) | BPDASHL, KPH, DLH, PLTA Poso Energy, Dinas PUPR | Dishut Prov, DLH Prov, BWS |
| | | | | Pelaksanaan pengukuran dan analisis debit dan laju sedimentasi | Penurunan laju erosi dan sedimentasi | Tersedianya data acuan penurunan laju erosi | BWS | Dinas PUPR |
| | | | | Pembangunan tanggul penahan sedimen | Penurunan laju erosi dan sedimentasi | Terbangunnya tanggul pengendali | BWS | Dinas PUPR |
| | | | | Pembuatan embung/dam parit, sumur resapan dan lubang biopori | Penurunan laju alir dan potensi banjir | Terbangunnya embung/dam parit, sumur resapan dan lubang biopori | BWS, BPDASHL, Dinas PUPR | Dinas LH |

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | | |
|--|--|---------|-------------------------------|--|---|--|---|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| Strategi 4. Pemantauan, Evaluasi dan Pengembangan Basis Data dan Sistem Informasi | | | | | | | | |
| 6. | Perlu ditingkatkannya pemantauan, evaluasi serta basis data dan sistem informasi | 4.1. | Penyediaan data | Pemantauan kondisi danau (meliputi morfologi, hidrologi, hidrobiologi, kualitas air, kondisi dan status ekosistem, keanekaragaman hayati, pemanfaatan air, karakteristik morfometri, neraca LH, kondisi DAS dan DTA) | Tersedianya data dan informasi bagi pengelolaan danau | Dilaksanakannya pemantauan dan penyediaan data | Kemristek Dikti, LIPI, BPPT, BIG, BPS, Dinas Kehutanan, BWS, BPDASHL, Dinas LH Prov dan Kab, Bapelitbangda Prov dan Kab, Perguruan Tinggi | Kemendagri, KLHK, Kem PUPR, Kem Pariwisata, Kem ESDM, KKP dan BPN |
| | | 4.2. | Pengembangan sistem informasi | Pengumpulan data dan informasi, penyajian data dan informasi (uraian, tabular maupun peta) serta pembuatan database dan sistem informasi pengelolaan danau | Tersajinya data dan terbangunnya sistem informasi | Dilaksanakannya pengumpulan data dan informasi, penyajian data serta pembangunan database dan sistem informasi pengelolaan danau | BWS, BPDASHL, Dinas LH Prov dan Kab | Perguruan Tinggi |
| Strategi 5. Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Peran Para Pihak | | | | | | | | |
| 7. | Perlu dikembangkannya kelembagaan pengelolaan danau dan ditingkatkannya peran para pihak | 5.1. | Pengembangan kelembagaan | Pembentukan kelembagaan, koordinasi dan peningkatan kapasitas | Terkelolanya danau secara terkoordinasi | Terbentuknya kelembagaan dan terlaksananya koordinasi | Kemendagri, Pemda Prov dan Kab, DPRD Prov dan Kab | Kem PUPR, KLHK, Kem Pertanian, Kem Pariwisata, Kem ESDM, KKP, LSM, Perguruan Tinggi |

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | | |
|----|--------------|---------|--|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | | 5.2. | Peningkatan peran serta masyarakat | Pembentukan, sosialisasi dan pembinaan kelompok masyarakat | Meningkatnya peran serta masyarakat | Terbentuknya kelompok masyarakat dan terlaksananya sosialisasi dan pembinaan | Kemendagri, Bappeda Prov dan Kab, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Dinas LH, Dinas Sosial Prov dan Kab, LSM, Perguruan Tinggi | KLHK, Kem Desa, Dinas Pendidikan |
| | | 5.3. | Pengembangan pariwisata danau ramah lingkungan | Penyusunan konsep wisata danau ramah lingkungan, pembinaan dan pelibatan masyarakat, penyediaan sarana prasarana wisata, serta promosi wisata | Meningkatnya peran serta dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pariwisata | Tersusunnya konsep wisata danau ramah lingkungan, terbina dan terlibatnya masyarakat, tersedianya sarana prasarana wisata, serta terlaksananya promosi wisata danau | Kem Pariwisata, Kem PUPR, KLHK, Bappeda Prov dan Kab, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas PUPR, Dinas Kominfo dan Dinas PMD Prov dan Kab, LSM, Perguruan Tinggi | Kemendagri, KKP, Kem Perindustrian, Kem Perhubungan |

13. DANAU TEMPE

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | | |
|----------------------------|---|---------|----------------|--|---|---|-------------------------------|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| Strategi 1. Penataan Ruang | | | | | | | | |
| 1 | Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan terjadinya konflik pemanfaatan ruang | 1.1. | Penataan Ruang | Penyusunan RTR Kawasan Danau Tempe | Pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung LH | Tersusun, ditetapkan, disosialisasikan dan diimplementasikannya RTR Kawasan Danau Tempe | BPPEDA, Dinas PUPR | Dinas LH |
| | | | | Penerbitan sertifikat kewenangan pengelolaan danau | Terhindarnya konflik kewenangan pengelolaan dan pemanfaatan ruang | Terbitnya sertifikat kewenangan pengelolaan danau | ATR/BPN, Kem PUPR | Dinas PUPR, Dinas LH |
| | | | | Penyusunan zonasi pemanfaatan ekosistem perairan danau (untuk perlindungan maupun pemanfaatan) | Pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung LH | Tersusun, ditetapkan, disosialisasikan dan diimplementasikannya Zonasi perairan Danau Tempe | Bappeda, Dinas PUPR, Dinas LH | Dinas Perikanan, LIPI, Perguruan Tinggi |

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | | |
|---|---------------------------------|---------|--------------------------------|---|--|---|--|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| Strategi 2. Penyelamatan Ekosistem Perairan Danau | | | | | | | | |
| 2. | Menurunnya kualitas air danau | g. | Pengelolaan kualitas air danau | Penetapan baku mutu dan status trofik air danau | Dicapainya kualitas air yang baik dan pemanfaatan danau sesuai dengan daya dukung daya tampung lingkungan (saat ini Danau Tempe berada dalam kondisi eutrofik sampai hipereutrofik, serta kekeruhan dan kandungan TSS yang tinggi) | Ditetapkan dan diimplementasikannya baku mutu dan status trofik air sebagai acuan pengelolaan danau | Dinas LHK, KLHK Dinas PUPR | Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas KKP, Dinas Pariwisata |
| 3. | Banyaknya eceng gondok di danau | 2.2. | Pengendalian eceng gondok | Pemanenan eceng gondok secara mekanik/fiisik | Berkurangnya tutupan eceng gondok | Menurunnya luasan tutupan eceng gondok | Dinas PUPR, Dinas Kelautan dan Perikanan | DLH |
| | | | | Pemanfaatan eceng gondok | Berkurangnya tutupan eceng gondok dan terciptanya usaha masyarakat | Terbangunnya usaha masyarakat pengolah eceng gondok | Dinas Kelautan dan Perikanan, DLH | Dinas PUPR, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| 4. | Sedimentasi danau | 2.3. | Pengendalian sedimentasi | Pengerukan sedimen danau yang memperhatikan ekosistem | Berkurangnya sedimentasi di danau dan meningkatnya volume tampung air danau (laju sedimentasi Danau Tempe sat ini adalah 1-3 cm/tahun) | Terlaksananya pengerukan danau | Kem PUPR (BWS) | Dinas PUPR, DLH, LIPI |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|----|------------------------------------|---------|----------------------------------|--|---|---|--|-------------------------------|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | Pemanfaatan sedimen danau yang bernilai ekonomi tinggi | Berkurangnya sedimen danau dan terciptanya usaha masyarakat | Tebentuknya usaha masyarakat pengolah sedimen danau | Dinas PUPR, BWS, Dinas LHK, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | KLHK Kem PUPR, Kep Pariwisata |
| 5. | Penurunan keanekaragaman hayati | 2.4. | Pelestarian spesies asli/endemik | Penyusunan dan penetapan regulasi pelarangan perikanan tangkap dengan alat destruktif | Lestarnya spesies asli/endemik | Tersusun dan diimplementasi-kannya regulasi perikanan tangkap | Dinas Kelautan dan perikanan, Setda | DLH, Perguruan Tinggi, LIPI |
| | | | | Pembangunan reservat pada zona konservasi ikan asli/endemik danau | Lestarnya spesies asli/endemik | Dibangunnya reservat ikan asli/endemik | Dinas Kelautan dan perikanan, DLH | Perguruan Tinggi, LIPI |
| | | | | Restocking ikan asli/endemik | Lestarnya spesies asli/endemik | Terlaksananya restocking ikan asli/endemik | Dinas Kelautan dan perikanan, DLH | Perguruan Tinggi, LIPI |
| | | | | Pelarangan restocking ikan spesies asing invasif | Lestarnya spesies asli/endemik | Terlaksananya pelarangan restocking ikan spesies asing invasive | Dinas Kelautan dan perikanan, DLH | Perguruan Tinggi, LIPI |
| 6. | Beulm tertatanya pemanfaatan danau | 2.5. | Penataan pemanfaatan danau | Pelaksanaan kajian, penyusunan dan implementasi peraturan pemanfaatan air (untuk PDAM, irigasi dan lainnya) yang memperhatikan ekosistem | Tertatanya pemanfaatan air dengan memperhatikan ekosistem | Dilaksanakannya kajian, serta disusun dan diimplementasi-kannya peraturan pemanfaatan air danau | Dinas PU, BWS, Dinas Pertanian | Bappeda, Dinas LH |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|--|--|---------|--|---|--|--|---|---------------------------|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | Penetapan Nilai Standar Jasa Lingkungan Pemanfaatan Air bagi PDAM dan irigasi | Terbangunnya peran para pihak dalam menjaga kelestarian sumber air | Ditetapkan dan diimplementasikan -annya jasa lingkungan pemanfaatan air bagi PDASM dan irigasi | BAPPEDA, Dinas PU, DLH, Dinas Pertanian | BWS, Dinas Kehutanan |
| Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Sempadan Danau | | | | | | | | |
| 7. | Pemanfaatan lahan sempadan danau yang tidak tertata, dan berpotensi mencemari/ merusak danau | 3.1. | Penataan kawasan sempadan | Penetapan batas sempadan danau Tempe | Pemanfaatan sempadan memperhatikan batas dan fungsinya sebagai kawasan lindung | Ditetapkannya batas sempadan Danau Tempe | Bappeda, BWS, Dinas PU | BPN, Dinas LHK |
| | | | | Pembangunan greenbelt dengan penanaman vegetasi di sekeliling danau | Mencegah erosi ke danau, meningkatkan resapan air, serta agar pemanfaatan sempadan memperhatikan batas dan fungsinya | Terlaksananya pembangunan greenbelt | BWS, Dinas PUPR, Dinas LH, Dinas Kehutanan, BPDASHL | Bappeda |
| | | | | Pembuatan tanggul dan jalan inspeksi di tepi danau yang memperhatikan ekosistem danau | Mencegah erosi ke badan danau serta mencegah okupasi lahan sempadan | Terlaksananya pembuatan tanggul dan jalan inspeksi | BWS, Dinas PUPR | Bappeda, Dinas LHK |
| 8. | Pencemaran dari sumber-sumber limbah di sekitar danau | 3.2. | Pengendalian pencemaran air dari kegiatan di sekitar danau | Penerapan pertanian organik | Berkurangnya beban pencemaran ke danau | Diterapkannya pertanian organik di sekitar danau | Dinas Pertanian, DLH | Bappeda, Perguruan Tinggi |
| | | | | Pembangunan IPAL komunal dan jamban keluarga | Berkurangnya beban pencemaran ke danau | Terbangunnya IPAL komunal | Dinas PUPR, Dinas LHK | Dinas Kesehatan, KLHK |
| 9. | Banyaknya sampah di sekitar danau | 3.3. | Pengelolaan sampah | Pembangunan pengolahan sampah | Terkelolanya sampah | Terbangunnya unit pengolahan sampah | Dinas PUPR, Dinas LHK | Dinas Kesehatan, KLHK |

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|---|--|--|--|--|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| Strategi 4. Penyelamatan Daerah Tangkapan Air | | | | | | | |
| 10 | Lahan kritis, erosi, banjir dan sedimentasi | 4.1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan di DTA danau | Pelaksanaan RHL vegetatif atau reboisasi | Berkurangnya erosi dan aliran permukaan (laju penurunan luasan danau saat ini sebesar 1,48 km ² per tahun, sehingga laju penurunan luas Danau Tempe dalam kurun waktu 25 tahun 1989 – 2015 mencapai ± 19,972,68 Ha) | Terlaksananya reboisasi di lahan kritis di DTA danau (luas lahan kritis saat ini mencapai 128.174,82 ha atau sebesar 45,15 % dari luas DTA; dimana 17,37% DTA atau 49.309,36 ha merupakan lahan dengan kepekaan erosi berat dan sangat berat; dimana 72,57% lahan DTA atau seluas 141.816,85 ha merupakan APL) | BPDASHL, Dinas LH, Dinas Kehutanan | Dinas Pertanian, Dinas PUPR |
| | | | Pelaksanaan RHL sipil teknis dengan pembuatan embung, sumur resapan dan lubang biopori | Berkurangnya aliran permukaan | Terlaksananya pembuatan embung, sumur resapan dan lubang biopori | BPDASHL, Dinas LH, Dinas Kehutanan | Dinas Pertanian, Dinas PUPR |
| 11 | Pencemaran dan kerusakan lahan akibat kegiatan pertanian yang tidak ramah lingkungan | 4.2. Pengembangan pertanian ramah lingkungan | Penerapan pertanian yang menerapkan prinsip Konservasi Tanah dan Air a.l. dengan pola terasering dan menggunakan pupuk organik | Berkurangnya erosi dan aliran permukaan, serta berkurangnya buangan bahan kimia ke perairan | Terlaksananya pertanian ramah lingkungan di 15 desa di sekitar danau | Dinas Pertanian | Dinas LH, Dinas Kehutanan, Dinas PUPR |

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | | |
|--|---|---------|---|--|--|--|--|--------------------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| Strategi 5. Pemantauan, Evaluasi dan Pengembangan Basis Data dan Sistem Informasi | | | | | | | | |
| 12 | Perlu ditingkatkannya pemantauan, evaluasi serta basis data dan sistem informasi | 5.1. | Penyediaan data | Pemantauan kondisi danau (meliputi morfologi, hidrologi, hidrobiologi, kualitas air, kondisi dan status ekosistem, keanekaragaman hayati, pemanfaatan air, karakteristik morfometri, neraca LH, kondisi DAS dan DTA) | Tersedianya data dan informasi bagi pengelolaan danau | Dilaksanakannya pemantauan dan penyediaan data | Bappeda, Dinas LH, BWS, Dinas PUPR | BPDASHL, DKP, LIPI, Perguruan Tinggi |
| | | 5.2. | Pengembangan pusat data dan sistem informasi | Pengumpulan data dan informasi, penyajian data dan informasi (uraian, tabular maupun peta) serta pembuatan database dan sistem informasi pengelolaan danau | Tersajinya data dan terbangunnya sistem informasi | Dilaksanakannya pengumpulan data dan informasi, penyajian data serta pembangunan database dan sistem informasi pengelolaan danau | Bappeda, BWS, BPDASHL, Dinas LH Prov dan Kab | Perguruan Tinggi |
| Strategi 6. Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Koordinasi dan Peran Para Pihak | | | | | | | | |
| 13 | Perlu dikembangkannya kelembagaan dan ditingkatkannya koordinasi dan peran para pihak | 6.1. | Pengembangan koordinasi antar pihak dalam pengelolaan danau | Penetapan komitmen dan pelaksanaan koordinasi pengelolaan danau (antar Kabupaten di Kawasan Danau Tempe: Wajo, Sidrap dan Soppeng) | Meningkatnya koordinasi para pihak dalam pengelolaan danau | Terwujudnya komitmen para pihak dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan danau | Bappeda Provinsi | Bappeda Kab, Dinas LH Prov dan Kab |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|----------------------------------|--|---|--|---|---|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | 6.2. | Peningkatan pemahaman para pihak | Sosialisasi pengelolaan danau kepada para pihak | Meningkatnya pemahaman para pihak | Terlaksananya kegiatan sosialisasi setiap tahun | BWS, BPDASHL, Dinas LH | Dinas PUPR, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Perguruan Tinggi, LSM |
| | | 6.3. | Pengembangan wisata danau Tempe | Pegembangan wisata danau berbasis masyarakat dan kearifan local dan penetapannya dalam kalender tahunan Festival Danau Tempe | Lestarinya ekosistem danau dan terciptanya usaha bagi kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat | Terwujudnya wisata yang ramah lingkungan, mengangkat kearifan local dan kesejahteraan masyarakat | BWS, BPDASHL, Dinas LHK, Dinas Perikanan dan Kelautan | Dinas LHK dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota, Perguruan Tinggi |

14.DANAU MATANO

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | | |
|---|-----------------------------------|---------|--------------------------------|--|--|---|-------------------------|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| Strategi 1. Penataan Ruang | | | | | | | | |
| 1 | Konflik pemanfaatan kawasan danau | 1.1. | Penataan Ruang | Penyusunan RTR Kawasan Danau Matano | Pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung LH | Tersusun, ditetapkan, disosialisasikan dan diimplementasikannya RTR Kawasan Danau Matano | BAPPEDA, BBKSDA | Dinas LH, Dinas Tata Ruang |
| | | | | Penyusunan zonasi pemanfaatan ekosistem perairan danau (untuk perlindungan maupun pemanfaatan) | Pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung LH | Tersusun, ditetapkan, disosialisasikan dan diimplementasikannya Zonasi perairan Danau Matano | BAPPEDA, BBKSDA | Dinas LH, Dinas Tata Ruang |
| Strategi 2. Penyelamatan Ekosistem Perairan Danau | | | | | | | | |
| 2. | Menurunnya kualitas air danau | h. | Pengelolaan kualitas air danau | Penetapan baku mutu dan status trofik air danau | Dipertahankannya kualitas air yang baik dan pemanfaatan danau sesuai dengan daya dukung daya tampung lingkungan (saat ini perairan Danau Matano berada dalam kondisi baik atau tercemar ringan, dengan status trofik ultraoligotrof) | Ditetapkan dan diimplementasikannya baku mutu dan status trofik air sebagai acuan pengelolaan danau | BBKSDA, Dinas LHK, KLHK | Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas KKP, Dinas Pariwisata, Dinas PUPR |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|----|---------------------------------|---------|---|---|-----------------------------------|---|---|---|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | i. | Penendalian pencemaran air dari berbagai sumber | Penertiban perikanan budidaya dengan KJA | | | | |
| | | | | Pengaturan transportasi air ramah lingkungan | | | | |
| 3. | Sedimentasi danau | 2.3. | Pengendalian sedimentasi | Pembangunan kolam pengendapa pada lahan pasca tambang | Berkurangnya sedimentasi di danau | Pembangunan kolam pengendapa pada lahan pasca tambang | Dinas ESDM, Dinas LH | Swasta |
| 4. | Penurunan keanekaragaman hayati | 2.4. | Pelestarian spesies asli/endemik | Penyusunan rencana perikanan danau | Lestarnya spesies asli/endemic | Tersusun dan diimplementasi-kannya rencana perikanan danau | BBKSDA, DLH, Dinas Kelautan dan Perikanan | Perguruan Tinggi, LIPI |
| | | | | Pembangunan reservat pada zona konservasi ikan asli/endemik danau | Lestarnya spesies asli/endemic | Dibangunnya reservat ikan asli/endemik | BBKSDA, DLH, Dinas Kelautan dan Perikanan | Perguruan Tinggi, LIPI |
| | | | | Restocking ikan asli/endemik | Lestarnya spesies asli/endemic | Terlaksananya restocking ikan asli/endemik | BBKSDA, DLH, Dinas Kelautan dan Perikanan | Perguruan Tinggi, LIPI |
| | | | | Pelarangan restocking ikan spesies asing invasive | Lestarnya spesies asli/endemic | Terlaksananya pelarangan restocking ikan spesies asing invasive | BBKSDA, DLH, Dinas Kelautan dan Perikanan | Perguruan Tinggi, LIPI, |
| | | | | Penertiban perdagangan ikan endemik | Lestarnya spesies asli/endemic | Terlaksananya pelarangan perdagangan ikan spesies endemic | BBKSDA, DLH, Dinas Kelautan dan Perikanan | Dinas Perindag, Perguruan Tinggi, LIPI, |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|--|--|---------|--|--|--|--|--|------------------------------------|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| 5. | Beulm tertatanya pemanfaatan danau | 2.5. | Penataan pemanfaatan danau | Pelaksanaan kajian, penyusunan dan implementasi peraturan pemanfaatan air danau untuk PLTA dan pemanfaatan danau untuk wisata yang memperhatikan ekosistem | Tertatanya pemanfaatan danau dengan memperhatikan ekosistem | Dilaksanakannya kajian, serta disusun dan diimplementasikannya peraturan pemanfaatan danau | Bappeda, BBKSDA, Dinas LH, Dinas ESDM, Dinas Pariwisata | Bappeda, Dinas PU, Dinas Pertanian |
| | | | | Penetapan Nilai Standar Jasa Lingkungan Pemanfaatan Danau/Air Danau | Terbangunnya peran para pihak dalam menjaga kelestarian sumber air | Ditetapkan dan diimplementasikannya jasa lingkungan pemanfaatan danau/air danau | BAPPEDA, BBKSDA, Dinas PU, DLH, Dinas Pertanian | BWS, Dinas Kehutanan |
| Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Sempadan Danau | | | | | | | | |
| 6. | Pemanfaatan lahan sempadan danau yang tidak tertata, dan berpotensi mencemari/ merusak danau | 3.1. | Penataan kawasan sempadan | Penetapan batas sempadan danau Matano | Pemanfaatan sempadan memperhatikan batas dan fungsinya sebagai kawasan lindung | Ditetapkannya batas sempadan Danau Matano | BBKSDA, Dinas LH, Dinas PUPR, Dinas Kelautan dan Perikanan | BPN, Perguruan Tinggi |
| | | | | Pembangunan greenbelt dengan penanaman vegetasi di sekeliling danau | Mencegah erosi ke danau, meningkatkan resapan air, serta agar pemanfaatan sempadan memperhatikan batas dan fungsinya | Terlaksananya pembangunan greenbelt | BBKSDA, Dinas LH, Dinas PUPR, Dinas BPDASHL | BPN, Perguruan Tinggi |
| 7. | Pencemaran dari sumber-sumber limbah di sekitar danau | 3.2. | Pengendalian pencemaran air dari kegiatan di sekitar danau | Penerapan pertanian organik | Berkurangnya beban pencemaran ke danau | Diterapkannya pertanian organik di sekitar danau | Dinas Pertanian, DLH | Bappeda, Perguruan Tinggi |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|--|---|---------|---|--|--|--|---------------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | Pembangunan septick tank permukiman dan IPAL terpadu di sekitar danau | Berkurangnya beban pencemaran ke danau | Terbangunnya septic tank permukiman dan IPAL terpadu di sekitar danau | Dinas PUPR, Dinas LHK | Dinas Kesehatan, KLHK |
| 8. | Banyaknya sampah di sekitar danau | 3.3. | Pengelolaan sampah | Pembangunan pengolahan sampah plastik | Terkelolanya sampah | Terbangunnya unit pengolahan sampah plastic | Dinas PUPR, Dinas LHK | Dinas Kesehatan, KLHK |
| Strategi 4. Penyelamatan Daerah Tangkapan Air | | | | | | | | |
| 9. | Lahan kritis, erosi, banjir dan sedimentasi | 4.1. | Rehabilitasi Hutan dan Lahan di DTA danau | Pelaksanaan RHL vegetatif atau reboisasi | Berkurangnya erosi dan aliran permukaan (saat ini luas lahan yang berada pada kepekaan erosi kelas TBE > 60 adalah 48.750,30 Ha atau 6,70% dari total lahan DTA. Selain itu di DTA danau terdapat tambang nikel dengan tingkat bahaya erosi cukup besar) | Terlaksananya reboisasi di lahan kritis di DTA danau seluas 23.125,35 ha penanaman dan 20.271,78 ha pengkayaan | BBKSDA, Dinas Kehutanan, BPASHL | Dinas LH, Dinas Pertanian |
| | | | | Pelaksanaan RHL sipil teknis dengan pembuatan danm penahan, gully plug, embung, sumur resapan dan lubang biopori | Berkurangnya erosi dan aliran permukaan | Terlaksananya pembuatan 50 dam penahan, 100 gully plug, embung, 50 sumur resapan dan lubang biopori | BBKSDA, Dinas Kehutanan, BPASHL | Dinas LH, Dinas Pertanian |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|---|--|---------|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| 10 | Maraknya penebangan dan pembalakan liar | 4.2. | Pengendalian penebangan dan pembalakan liar | Tata kelola dan pengawasan hutan | Berkurangnya pembalakan, penebangan dan pembukaan lahan illegal atau secara tidak ramah lingkungan | Terlaksananya tata kelola dan pengawasan hutan | BBKSDA, Dinas Kehutanan, BPASHL | Dinas LH, Dinas Pertanian |
| 11 | Pencemaran dan kerusakan lahan akibat kegiatan pertanian yang tidak ramah lingkungan | 4.3. | Pengembangan pertanian ramah lingkungan | Penerapan pertanian yang menerapkan prinsip Konservasi Tanah dan Air a.l. dengan pola terasering dan menggunakan pupuk organik | Berkurangnya erosi dan aliran permukaan, serta berkurangnya buangan bahan kimia ke perairan | Terlaksananya pertanian ramah lingkungan | Dinas Pertanian, KLHK | Dinas LH, Dinas Kehutanan, Dinas PUPR |
| Strategi 5. Pemantauan, Evaluasi dan Pengembangan Basis Data dan Sistem Informasi | | | | | | | | |
| 12 | Perlu ditingkatkannya pemantauan, evaluasi serta basis data dan sistem informasi | 5.1. | Penyediaan data | Pemantauan kondisi danau (badan air, sempadan hingga DTA) | Tersedianya data dan informasi bagi pengelolaan danau | Dilaksanakannya pemantauan dan penyediaan data | Bappeda, BBKSDA, Dinas LH, BPDASHL, BWS, Dinas PUPR | DKP, Dinas Kehutanan, LIPI, Perguruan Tinggi, PT Vale |
| | | 5.2. | Pengembangan pusat data dan sistem informasi | Pengumpulan data dan informasi, penyajian data dan informasi (uraian, tabular maupun peta) serta pembuatan database dan sistem informasi pengelolaan danau | Tersajinya data dan terbangunnya sistem informasi | Dilaksanakannya pengumpulan data dan informasi, penyajian data serta pembangunan database dan sistem informasi pengelolaan danau | Bappeda, BBKSDA, BPDASHL, Dinas LH Prov dan Kab, BWS | Perguruan Tinggi |
| Strategi 6. Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Koordinasi dan Peran Para Pihak | | | | | | | | |
| 13 | Perlu dikembangkannya kelembagaan | 6.1. | Pengembangan koordinasi antar pihak dalam | Penetapan komitmen dan pelaksanaan | Meningkatnya koordinasi para | Terwujudnya komitmen para pihak dan | Bappeda | BBKSDA, BPDASHL, BWS, Dinas terkait di |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|----|---|---------|--|---|---|--|---|---|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | dan ditingkatkannya koordinasi dan peran para pihak | | pengelolaan danau | koordinasi pengelolaan danau (antar Kabupaten di Kawasan Danau Tempe) | pihak dalam pengelolaan danau | koordinasi pelaksanaan pengelolaan danau | | Prov dan Dinas terkait di Kab |
| | | 6.2. | Peningkatan pemahaman para pihak | Sosialisasi pengelolaan danau kepada para pihak | Meningkatnya pemahaman para pihak | Terlaksananya kegiatan sosialisasi setiap tahun | Bappeda, Dinas LH, BBKSDA | BPDASHL, BWS, Dinas terkait di Prov dan Kab, LSM, masyarakat, dunia usaha |
| | | | | Penjadwalan dan pelaksanaan kegiatan berkala pengelolaan danau a.l. bersih-bersih danau bersama masyarakat dan instansi terkait | Meningkatnya kepedulian dan keterlibatan para pihak | Terlaksananya kegiatan pengelolaan danau bersama secara berkala | Bappeda, Dinas LH, BBKSDA | BPDASHL, BWS, Dinas terkait di Prov dan Kab, LSM, masyarakat, dunia usaha |
| | | 6.3. | Pelibatan masyarakat dan lembaga adat dalam pengelolaan Danau Matano | Pembentukan dan pembinaan forum masyarakat adat pencinta Danau Matano | Meningkatnya peran masyarakat dan lembaga adat | Terlaksananya pembentukan dan pembinaan forum masyarakat adat pencinta Danau Matano | Bappeda, Dinas LH, BBKSDA | BPDASHL, BWS, Dinas terkait di Prov dan Kab |
| | | 6.4. | Pengembangan wisata danau Matano | Pegembangan wisata danau berbasis masyarakat dan kearifan lokal dan penetapannya dalam kalender tahunan Festival Danau Matano | Lestarinya ekosistem danau dan terciptanya usaha bagi kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat | Terwujudnya wisata Danau Matano yang ramah lingkungan, mengangkat kearifan lokal, mensejahterakan masyarakat | Bappeda, BBKSDA, Dinas LH, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | BPDASHL, BWS, Dinas Pendidikan, Perindag, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota, Perguruan Tinggi |

15. DANAU SENTANI

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | | |
|---|-----------------------------------|---------------------|--|---|--|--|---|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| Strategi 1. Penataan Ruang | | | | | | | | |
| 1 | Konflik pemanfaatan kawasan danau | 1.1. Penataan Ruang | Penyusunan RTR Kawasan Danau dan Zonasi Perlindungan dan Pemanfaatan Danau Sentani | Pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung LH | Tersusun, ditetapkan, disosialisasikan dan diimplementasikannya RTR Kawasan Danau dan Zonasi Danau Sentani | Bappeda dan BLH Prov | BAPPEDA, BLH Kab dan Kota, BPDAS, BWS, Dinas PU, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kehutanan | |
| Strategi 2. Penyelamatan Ekosistem Perairan Danau | | | | | | | | |
| 2. | Menurunnya kualitas air danau | j. | Pengelolaan kualitas air danau | Penentuan penetapan dan penerapan baku mutu dan status trofik air danau | Dipertahankannya kualitas air yang baik (cemar ringan) dan pemanfaatan danau sesuai dengan daya dukung daya tampung lingkungan (saat ini perairan Danau Sentani berada pada kondisi eutrofik-mesotrofik) | Ditetapkan dan diimplementasikannya baku mutu air sebagai acuan pengelolaan danau | BLH Prov | BLH Kab dan Kota, Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | k. | Pengendalian pencemaran air dari berbagai sumber | Pengendalian kegiatan di perairan danau melalui proses perijinan, pengawasan dan penertiban | Dipertahankannya kualitas air yang baik (cemar ringan) dan pemanfaatan danau sesuai dengan daya dukung daya tampung lingkungan | Dilaksanakannya pengendalian kegiatan di perairan danau melalui perijinan, pengawasan dan penertiban | BLH Prov | BLH Kab dan Kota, Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan |

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|---|--|---------|----------------------------------|--|--|--|----------------------|---|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| 3. | Penurunan keanekaragaman hayati | 2.4. | Pelestarian spesies asli/endemik | Penangkaran dan penyebaran ikan endemik | Lestarnya ikan endemik | Terlaksananya penangkaran dan penyebaran ikan endemik | BLH Prov | BLH Kab dan Kota, Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan |
| Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Sempadan Danau | | | | | | | | |
| 4. | Pemanfaatan lahan sempadan danau yang tidak tertata, dan berpotensi mencemari/ merusak danau | 3.1. | Penataan kawasan sempadan | Penetapan batas sempadan danau Matano dan pemasangan patok batas | Pemanfaatan sempadan memperhatikan batas dan fungsinya sebagai kawasan lindung | Ditetapkannya batas sempadan Danau Sentani | Bappeda Kab dan Kota | Dinas PU, Dinas Tata Ruang, Dinas Kehutanan, Dinas LH |
| | | | | Penertiban dan pengawasan bangunan dan kegiatan pemanfaatan sempadan | Pemanfaatan sempadan memperhatikan batas dan fungsinya sebagai kawasan lindung | Dilaksanakannya penertiban dan pengawasan bangunan dan kegiatan pemanfaatan sempadan | Bappeda Kab dan Kota | Dinas PU, Dinas Tata Ruang, Dinas Kehutanan, Dinas LH |
| | | | | Pembangunan greenbelt dengan penanaman dan pemeliharaan vegetasi di sekeliling danau | Mencegah erosi ke danau, meningkatkan resapan air, serta pemanfaatan sempadan yang memperhatikan batas dan fungsinya | Terlaksananya pembangunan greenbelt | Bappeda Kab dan Kota | Dinas PU, Dinas Tata Ruang, Dinas Kehutanan, Dinas LH |
| 5. | Pencemaran dari limbah domestik dan banyaknya sampah di sekitar danau | 3.2. | Pengelolaan limbah dan sampah | Pembangunan unit pengelolaan limbah dan sampah | Terkelolanya limbah dan sampah di sekitar danau | Dibangunnya unit pengolahan limbah dan pengelolaan sampah | Bappeda Kab dan Kota | Dinas PU, Dinas Tata Ruang, Dinas Kehutanan, Dinas LH |

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | |
|---|--|--|---|---|---|----------------------|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| Strategi 4. Penyelamatan Daerah Tangkapan Air | | | | | | | |
| 6. | Lahan kritis, erosi, banjir dan sedimentasi | 4.1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan di DTA danau dan mempertahankan luas hutan minimal 30% DAS/DTA | Pelaksanaan RHL vegetatif atau reboisasi | Berkurangnya laju erosi sebesar 15-20 ton/ha.tahun, dan terpulihkannya lahan kritis (saat ini sekitar 90 ton atau \pm 5 m/thn sedimen masuk ke Danau Sentani) | Berkurangnya lahan kritis sebesar 2000 ha | Bappeda Kab dan Kota | Dinas PU, Dinas Tata Ruang, Dinas Kehutanan, Dinas LH, BPDASHL, BBKSDA |
| Strategi 5. Pemantauan, Evaluasi dan Pengembangan Basis Data dan Sistem Informasi | | | | | | | |
| 7. | Perlu ditingkatkannya pemantauan, evaluasi serta basis data dan sistem informasi | 5.1. Penyediaan data | Pemantauan dan evaluasi kondisi danau secara rutin (meliputi morfologi, hidrologi, hidrobiologi, kualitas air danau, debit dan kualitas air sungai inlet, jumlah dan sebaran sedimentasi, kondisi dan status ekosistem, keanekaragaman hayati, pemanfaatan air, karakteristik morfometri, neraca LH, kondisi DAS/DTA) | Tersedianya data dan informasi bagi pengelolaan danau | Dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi kondisi danau | BLH Prov | BPDASHL, BWS, BMKG, BPKH, BBKSDA, Dinas Kehutanan, LIPI, Perguruan Tinggi |

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2020-2024) | Penanggung jawab | | |
|---|---|---------|---|--|--|--|---------------------------------|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | | 5.2. | Pengembangan pusat data dan sistem informasi | Pengumpulan data dan informasi, penyajian data dan informasi (uraian, tabular maupun peta) serta pembuatan database dan sistem informasi pengelolaan danau | Tersajinya data dan status kerusakan, terbangunnya sistem dan penyebarluasan informasi | Dilaksanakannya pengumpulan data dan informasi, penyajian data, pembangunan database dan sistem serta penyebarluasan informasi danau dan pengelolaan danau | Bappeda, BLH Prov | BPDASHL, BWS, BMKG, BPKH, Dinas Kehutanan, Perguruan Tinggi |
| Strategi 6. Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Koordinasi dan Peran Para Pihak | | | | | | | | |
| 8. | Perlu dikembangkannya lembaga dan ditingkatkannya koordinasi dan peran para pihak | 6.1. | Pengembangan koordinasi antar pihak dalam pengelolaan danau | Penyusunan Perda Provinsi tentang Lembaga Koordinasi Pengelolaan dan Penyelamatan Danau Sentani | Meningkatnya koordinasi dan kesepahaman para pihak dalam pengelolaan danau | Tersusunnya dan diimplementasikannya Perda Kelembagaan Pengelolaan dan Penyelamatan Danau Sentani | Bappeda Prov, BLH Prov, BPDASHL | Bappeda dan BLH Kab dan Kota, Dinas Kehutanan |
| | | 6.2. | Peningkatan peran para pihak | Pembentukan Forum DAS Sentani-Tami | Meningkatnya peran para pihak | Terbentuknya Forum DAS Sentani Tami | Bappeda Prov, BLH Prov, BPDASHL | Bappeda dan BLH Kab dan Kota, Dinas Kehutanan |
| | | | | Pembentukan dan pembinaan kelompok pencinta danau | Meningkatnya peran para pihak | Terbentuk dan terbinanya 5 kelompok pencinta danau per tahun | Bappeda Prov, BLH Prov, BPDASHL | Bappeda dan BLH Kab dan Kota, Dinas Kehutanan |
| | | | | Pendidikan dan pelatihan penyelamatan danau bagi masyarakat | Meningkatnya peran para pihak | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan penyelamatan danau bagi masyarakat | BLH Kab dan Kota | Bappeda Kab dan Kota, Badan Pemberdayaan Kampung, Dinas Kehutanan |